



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



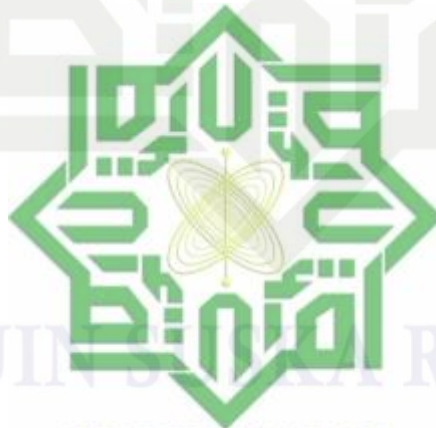
EFEKTIVITAS KINERJA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU TERKAIT PENANGANAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum Pada Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri
Sultan Syarif Kasim Riau

OLEH

FENI HAFIZA
NIM. 11624200698



UIN SUSKA RIAU

PROGRAM STUDI S1 JURUSAN HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKANBARU

2020

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skrripsi yang berjudul : **Efektivitas Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Terkait Pemangangan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah**

Nama : Feni Hafiza
Nim : 11624200698
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

21 Februari 2020
Pembimbing Skripsi


H. Mohd. Kastulani, S.H., M.H
NIP: 196309 199002 1 001

UIN SUSKA RIAU

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

: EFEKTIVITAS KINERJA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU TERKAIT
PENANGANAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA PEKANBARU
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

: FENI HEFIZA

: 11624200698

: HUKUM TATA NEGARA

telah dimunaqasyahkan pada :

Hari / Tanggal : Kamis / 25 Juni 2020

Waktu : 13.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru, 2020

Tim Penguji

H. Rahman Alwi, M.Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)

Dra. Nurlaili, M.SI.
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)

3. Dr. Prisman, M.Sy.
(Anggota Penguji)

4. Irfan Zulfikar, M.Ag
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
3. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
4. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

FENI HAFIZA
NIM:11624200698

Skripsi ini berjudul: EFEKTIVITAS KINERJA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU TERKAIT PENANGANAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

Adapun penulisan skripsi ini berlatar belakang dari banyaknya Anak Jalanan di Kota Pekanbaru. Mereka menghabiskan waktu dijalanan padahal seharusnya mereka tumbuh besar dengan kehidupan yang layak dan mendapatkan pendidikan justru malah sebaliknya. Pemerintah Kota Pekanbaru juga telah mengeluarkan kebijakan yang melarang aktivitas di jalanan yang meresahkan masyarakat.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengangkat beberapa pokok permasalahan yakni peran Dinas Sosial terkait Penanganan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru, Efektivitas penanganan terhadap penurunan jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru, dan Tinjauan Fiqh Siyasah dalam penanganan Anak Jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian Sosiologis Hukum dengan metode Penelitian lapangan (*field research*) yang berlokasi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Adapun metode pengumpulan data dalam penelitian ini adalah melalui observasi, dan wawancara sebagai data primer yang dihimpun dari pihak Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Sedangkan data sekunder data yang didapat dari buku-buku, dokumentasi yang terkait langsung dengan permasalahan yang diteliti, setelah data tersebut diperoleh, lalu dianalisa dengan deskriptif kualitatif.

Melalui wawancara dan observasi dilapangan penulis memperoleh hasil setelah mengetahui permasalahan yang ada, maka penulis meninjau dengan pandangan Fiqh Siyasah dengan menampilkan nash Al-Qur'an, hadist, dan kaedah fiqhiyah untuk mempertegas kesimpulan yang ditarik.

Dari uraian yang disajikan dan dari tinjauan yang telah dilakukan, maka penulis memperoleh jawaban bahwasannya terkait Penanganan terhadap Anak Jalanan di Kota Pekanbaru yang dilakukan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sesuatu yang belum mencapai ukuran suatu efektivitas. Dimana Peran Dinas Sosial belum terwujud sepenuhnya dibuktikan dengan meningkatnya jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru. Dengan demikian hasil dari penanganan anak jalanan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru tidak sesuai dengan tinjauan Fiqh Siyasah dikarenakan pemimpin adalah orang yang bertanggung jawab sepenuhnya terhadap kesejahteraan masyarakatnya.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur hanya kepada Allah Swt yang Maha Mengasihi dan Maha Adil, yang telah memberikan kesehatan dan keluangan waktu kepada penulis untuk dapat menyusun skripsi ini, tanpa hidayah dan taufiq-Nya tidak mungkin skripsi ini dapat diselesaikan seperti saat sekarang ini.

Shalawat dan salam kehadirat junjungan alam, sang revolusioner yang disegani oleh kawan dan lawan, yaitu Nabi Muhammad SAW, berkat perjuangan beliau Islam tersebar di berbagai penjuru dunia, sehingga umatnya terasa tentram dan damai atas ajaran-ajaran yang dibawanya.

Skripsi ini berjudul **“Efektivitas Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Terkait Penanganan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyasah”**. Dalam penulisan ini penulis banyak menemukan kesulitan-kesulitan dan rintangan disebabkan terbatasnya sarana dan prasarana serta ilmu yang penulis miliki. Tanpa bantuan dan motivasi dari semua pihak, skripsi ini tidak akan selesai sebagaimana mestinya. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Ayahanda Iskandar Ashari, ibunda Nurhayati , kakak Tri Reski Ervina, dan adik Taufik Qurrahman yang telah memberikan bantuan materil, moril maupun spirituil kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.
2. Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, S.Ag, M.Ag, selaku Rektor UIN SUSKA RIAU, Wakil Rektor 1 Bapak Drs. H. Suryan A.Jamrah, M.A, Wakil



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Rektor II, Bapak H.Kusnedi, M.Pd, Wakil Rektor III Bapak H.Promadi.,Ph.D. dan seluruh jajaran civitas akademika UIN SUSKA RIAU.

3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bapak Dr. H. Hajar, M.Ag, Wakil Dekan I bapak Dr. Drs. Heri Sunandar, M.CL, Wakil Dekan II bapak Dr. Wahidin, M.Ag, dan bapak Wakil Dekan III Dr.H. Maghfirah, MA.

4. Ketua Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Rahman Alwi, M.Ag serta Sekretaris Jurusan Hukum Tata Negara (Siyasah) bapak Irfan Zulfikar M.Ag yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan perkuliahan di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

5. Bapak H. Mohd. Kastulani S.H.,M.H selaku pembimbing yang telah memberikan petunjuk, arahan dan bimbingan dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Penasehat Akademis (PA) penulis yang selalu memberikan saran-saran dan motivasi kepada penulis selama kuliah di UIN SUSKA RIAU ibu Dra. Nurlaili M.Si.

7. Bapak dan ibu dosen Fakultas Syari'ah dan Hukum khususnya dan seluruh dosen Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau pada umumnya, yang telah memberikan ilmu serta pengetahuan kepada penulis selama menimba ilmu di UIN SUSKA RIAU.

8. Keluarga besar Hukum Tata Negara (Siyasah), terkhusus keluarga HTNS angkatan 16 yang telah banyak membantu dan memberikan saran kepada penulis selama belajar mengajar di bangku perkuliahan. Semoga kekeluargaan kita tetap bersatu selamanya.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Untuk Sahabat dan Teman-Teman. Konsultasi Grup, Sobat Ambyar, BFF Squad, KSJ Squad, Kos Cantik, Supergelis Squad, Sconers Class, Bidikmisi 2016. Beserta seluruh Sahabat dan Teman Penulis lainnya.

10. Untuk semua keluarga, sahabat, teman, inspirator dan orang-orang spesial dalam hidup penulis yang memberikan motivasi dan nasehat, yang nama-namanya tak dapat disebutkan satu-persatu, penulis ucapkan terimakasih atas semuanya. Hanya Allah SWT yang bisa membalas semua kebaikan yang telah diberikan kepada penulis.

Akhirnya kepada Allah SWT penulis berserah diri dan kepada manusia penulis mohon maaf dan semoga apa-apa yang kita kerjakan mendapat keridhoan dari Allah SWT. Amin ya robbal 'alamin.

Pekanbaru, 21 Februari 2020

Penulis

Feni Hafiza
NIM. 11624200698

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	13
C. Rumusan Masalah	14
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian.	14
E. Metode Penelitian.....	15
 BAB II TINJAUAN UMUM	
A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru	21
1. Demografi Kota Pekanbaru.....	22
B. Dinas Sosial Kota Pekanbaru	24
1. Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru	24
2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru	28
3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru.....	31
4. Identifikasi Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru	37
5. Bagan Susunan Dinas Sosial Kota Pekanbaru	39
 BAB III TINJAUAN TEORITIS	
A. Konsep Efektivitas Kinerja	40
1. Pengertian Efektivitas	40
2. Pengertian Kinerja	41
3. Ukuran Efektivitas Kinerja	41
B. Anak Jalanan	42
1. Pengertian Anak.....	42
2. Pengertian Jalanan	43
3. Pengertian Anak Jalanan	44
4. Latar Belakang Anak Jalanan	47
5. Karakteristik Anak Jalanan	54
C. Siyasah Dusturiyah	57
1. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah ..	56
2. Konsep Kekuasaan dalam Siyasah Dusturiyah.....	57
 BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Peran Dinas Sosial Terkait Penanganan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru	60



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Efektivitas Penanganan Terhadap penurunan Jumlah Anak Jalanan di Kota Pekanbaru	78
C. Tinjauan Fiqh Siyash Terkait Penanganan Terhadap Anak Jalanan yang Dilakukan Oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru	81
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	93
B. Saran.....	94

DAFTAR KEPUSTAKAAN LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel II.1 Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru	38
Tabel II.2 Data Latar Belakang Pendidikan Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru	38
Tabel III.1 Ciri-Ciri Fisik dan Psikis Anak Jalanan	55
Table IV.1 Data Jumlah Anak Jalanan Kota Pekanbaru 2018-2019	78
Tabel IV.2 Data Anak Jalanan Terjaring Razia.....	81



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar II.1 Peta Wilayah Kota Pekanbaru	22





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara yang menerapkan sistem pemerintahan demokrasi yang sesuai dengan Pancasila, dalam hal ini pemerintah Indonesia harus mampu menjalankan roda pemerintahan dengan sifat-sifat pemimpin yang sesuai dengan sistem pemerintahannya. Pemerintahan sebuah negara khususnya harus memiliki teknis untuk melaksanakan tugas dan kewajibannya. Pemerintahan diartikan sebagai segala hal baik berupa perbuatan, urusan, kegiatan, dan sebagainya yang memerintah atau pemerintahan merupakan suatu perbuatan memerintah yang tidak dapat terlepas dari suatu sistem, karena sistem dan pemerintahan akan selalu berjalan beriringan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Pemerintah yaitu suatu bentuk sistem yang mengatur masyarakat dalam sebuah negara. Pemerintah harus mampu mengemban kewajiban untuk mewujudkan tujuan bersama.³⁰

Islam menetapkan tujuan dan tugas utama pemimpin adalah untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah dan Rasul-Nya serta melaksanakan perintah-perintah-Nya. Islam juga memerintahkan kaum muslimin untuk taat dan patuh kepada orang yang memegang kekuasaannya. Seperti yang dijeaskan dalam Q.S An-Nisa ayat 59 yang berbunyi:

³⁰ Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru: Suska Press, 2018), h.40.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ
فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya: “ Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. kemudian jika kamu berlainan Pendapat tentang sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”.

Ayat ini memerintahkan agar kaum muslimin taat dan patuh kepada-Nya, kepada rasul-Nya dan kepada orang yang memegang kekuasaan di antara mereka agar tercipta kemaslahatan umum. Untuk kesempurnaan pelaksanaan amanat dan hukum sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, hendaklah kaum muslimin. Taat dan patuh kepada perintah Allah Swt dengan mengamalkan isi kitab suci al-Qur'an, melaksanakan hukum-hukum yang telah ditetapkan-Nya, Melaksanakan ajaran-ajaran yang dibawa Rasulullah SAW pembawa amanat dari Allah Swt untuk dilaksanakan oleh segenap hamba-Nya. Patuh kepada ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan ulil amri adalah orang-orang yang memegang kekuasaan di antara mereka.

Ibnu Taimyah mengungkapkan bahwa kewajiban seorang pemimpin yang telah ditunjuk dipandang dari segi agama dan dari segi ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Allah. Pendekatan diri kepada Allah adalah dengan menaati peraturan-peraturan-Nya dan Rasul-Nya. Namun hal itu lebih sering disalah gunakan oleh orang-orang yang ingin mencapai kedudukan dan harta.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

Artinya: Dari Ibn Umar R.a. Sesungguhnya Rasulullah Saw. Berkata:”Kalian adalah pemimpin, yang akan dimintai pertanggungjawaban. Penguasa adalah pemimpin, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Suami adalah pemimpin keluarganya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dirumah suaminya, dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pelayan adalah pemimpin dalam mengelola harta tuannya, dan akan dimintai pertanggungjawaban tentang kepemimpinannya. Oleh karena itu kalian sebagai pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya.“

Hal yang paling mendasar yang dapat diambil dari hadis diatas adalah bahwa dalam level apapun, manusia adalah pemimpin termasuk bagi dirinya sendiri. Setiap perbuatan dan tindakan memiliki resiko yang harus dipertanggungjawabkan. Setiap orang adalah pemimpin meskipun pada saat yang sama setiap orang membutuhkan pemimpin ketika ia harus berhadapan untuk menciptakan solusi hidup di mana kemampuan, keahlian, dan kekuatannya dibatasi oleh sekat yang ia ciptakan sendiri dalam posisinya sebagai bagian dari komunitas.³¹

Menurut Islam pemimpin dan kepemimpinan adalah fitrah kemanusiaan, sejak manusia ada, maka pada saat itu pemimpin dan kepemimpinan juga telah ada. Pemimpin dan kepemimpinan adalah rekognisi (pengakuan), baik pengakuan formal maupun informal, baik sifatnya tunggal

³¹ Muhammad Khidri Alwi, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Hadist*, Jurnal (UIN Alauddin Makassar: 2017) Vol.5.No 2. h.45.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(diri sendiri) maupun jamak (banyak). Pemimpin yang memiliki jiwa kepemimpinan adalah sosok yang mampu menerjemahkan nilai-nilai spiritual dan motivasi dalam sebuah sistem formal maupun informal.³²

Seorang pemimpin harus bersikap dan berperilaku yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Pancasila sebagai dasar Negara maupun Pancasila sebagai idiologi Negara merupakan lima poin yang dijadikan dasar Negara dan pandangan hidup bagi bangsa Indonesia, baik penegakan hukum, beragama, dan tolong-menolong antar warga negara.

Persatuan Indonesia merupakan Sila ke-tiga Pancasila yang menjadi dasar negara Indonesia. Persatuan Indonesia ini ditunjukkan dalam rangka mewujudkan sila ke-lima yakni Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada sila ke-lima ini terdapat makna Pancasila bahwa setiap warga Negara berhak mendapatkan kemakmuran dan kesejahteraan, saling memberikan perlindungan kepada yang lemah, seluruh kekayaan Indonesia di pergunakan dengan baik untuk kebahagiaan dan kepentingan bersama.³³

Namun untuk menjamin sila ke-tiga tersebut bisa terlaksana dengan baik, pengalaman sila ke-empat yakni kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan menjadi teramat penting. Hal tersebut harus didorong dengan pola pikir yang berorientasi kerakyatan, dimana nilai-nilai dalam pancasila dibuat dari nilai moral yang hidup di masyarakat, diciptakan oleh masyarakat dan tujuan untuk masyarakat itu

³² Veithzal Rivai, Arviyan Arivin, *Islamic Leadership*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009) h.225.

³³ Artis, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Pekanbaru: Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim riau, 2014), h.8.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sendiri. Pola pikir seperti itulah yang di harapkan dalam kesejahteraan sosial kemasyarakatan di Indonesia.

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk terbanyak keempat di dunia. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) dengan populasinya hampir 270.054.853 juta jiwa pada tahun 2018.³⁴ Masalah kependudukan ini diikuti oleh masalah ekonomi yang menyebabkan hal-hal yang berkaitan dengan berbagai masalah sosial terjadi, yang salah satunya adalah mengenai anak jalanan.³⁵

Dalam Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menyebutkan “Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.”³⁶ Undang-Undang ini menjelaskan perlindungan dan hak warga negara Indonesia dalam perihal pekerjaan dan keseluruhan penunjang kehidupan dengan ukuran layak bagi kehidupan. ”. Dalam kata “berhak mendapatkan” merupakan setiap manusia memiliki hak tersebut. Sedangkan kata “berhak atas” bermakna seseorang berhak memiliki haknya yang sudah ditentukan. Dengan kata lain Undang-Undang ini bermakna setiap warga negara harus ada dalam batas hidup sejahtera dengan tujuan agar setiap masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan terhindar dari garis kemiskinan.

³⁴ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pusat Statistik, *Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*, (Jakarta: Badan Pusat Statistik, 2013), h.24.

³⁵ Shanti Devi, *Kapasitas kader dalam penyuluhan keluarga berencana Di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan*, Jurnal Penyuluhan (Sumatera Selatan: 2016) Vol.12 No.2, h.144.

³⁶ Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selain itu, dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa “Fakir Miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara”.³⁷ Ada-nya ketentuan mengenai kesejahteraan sosial yang jauh lebih lengkap dibandingkan dengan sebelum perubahan merupakan bagian upaya mewujudkan Indonesia sebagai negara kesejahteraan (*welfare state*) sehingga rakyat dapat hidup sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Di dalam rumusan tersebut terkandung maksud untuk lebih mendekatkan gagasan negara kesejahteraan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ke dalam realitas. Negara Indonesia sebagai negara kesejahteraan, berarti terdapat tanggung jawab negara untuk mengembangkan kebijakan negara di berbagai bidang kesejahteraan serta meningkatkan kualitas pelayanan umum (*public services*) yang baik melalui penyediaan berbagai fasilitas yang diperlukan oleh masyarakat.

Kata fakir miskin yang terdapat dalam ketentuan Pasal 34 ayat (1) mempunyai pengertian yang berbeda. Oleh karena itu, perkataan fakir miskin tidak dapat dipahami sebagai satu kesatuan konsep. Kedua kata itu berasal dari bahasa Arab dengan pengertian berbeda. Kata fakir berarti ‘orang yang tidak mampu berusaha menghidupi dirinya sendiri’, sedangkan miskin “orang yang mampu berusaha tetapi tidak mencukupi kebutuhan minimum untuk menghidupi dirinya sendiri”.³⁸

Hal tersebut juga dijelaskan dalam Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial pada Pasal 4 yang menyebutkan bahwa “Negara bertanggung jawab atas penyelenggaraan kesejahteraan sosial”³⁹

³⁷ Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

³⁸ Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta: Al-Kautsar, 2015), h.213.

³⁹ Pasal 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang ini menunjukkan betapa tinggi hasrat dan martabat bangsa Indonesia untuk memajukan bangsanya, demi mewujudkan kesejahteraan rakyat yang merata disemua lapisan masyarakat.

Dalam permasalahan ini juga ditegaskan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah yang terdapat pada pasal 2 ayat (3) yang berbunyi “Pemerintah mendorong, membimbing, membina masyarakat untuk berperan serta melaksanakan kesejahteraan anak”.⁴⁰

Memang belum ada Peraturan Daerah khusus yang mendasari penanganan anak jalanan, namun ada Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Hak Dasar Anak, dan juga ada usaha pemerintah dalam hal ini kota Pekanbaru yaitu membuat keputusan tersebut yang berisi tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penanggulangan Tuna Sosial Kota Pekanbaru. Tim ini diantaranya bertugas melakukan penertiban dan pemberdayaan anak jalanan di Kota Pekanbaru. Dalam implementasinya dimasyarakat itu dapat berlangsung secara normal, tetapi dapat juga terjadinya hambatan dalam implementasinya. Oleh karena itu, hak warga negara untuk mendapatkan kesejahteraan sosial itu harus didapatkan khususnya masyarakat Kota Pekanbaru.

Dalam hal ini, titik fokus permasalahannya khususnya berada di Kota Pekanbaru. Kota Pekanbaru merupakan Ibu Kota Provinsi Riau, dan salah satu kota terbesar di Indonesia. Kota ini merupakan salah satu sentra ekonomi

⁴⁰ Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terbesar dibagian Timur Pulau Sumatera dan termasuk sebagai kota dengan tingkat migrasi, urbanisasi dan pertumbuhan penduduk yang tinggi.⁴¹ Memang tidak dapat dipungkiri Kota Pekanbaru yang terdiri dari 12 kecamatan yaitu Tampan, Payung Sekaki, Bukit Raya, Marpoyan Damai, Tenayan Raya, Lima Puluh, Sail, Pekanbaru Kota, Sukajadi, Senapelan, Rumbai, dan Rumbai Pesisir telah mengalami banyak kemajuan yang mengundang banyak orang untuk tinggal dan berusaha hidup di dalamnya. Menurut data Badan Pusat Statistik, jumlah penduduk Kota Pekanbaru mencapai 1.091.088 ribu jiwa pada tahun 2018.⁴²

Perkembangan yang cukup pesat ini yang menyebabkan timbulnya masalah sosial, yang salah satunya penanganan terhadap anak jalanan tersebut. Bagi mereka yang mempunyai bekal ilmu pengetahuan dan keterampilan yang cukup bukan tidak mungkin mereka mampu bertahan di kota ini. Tapi sebaliknya bagi mereka yang belum beruntung rela melakukan apapun untuk bertahan hidup. Bahkan anak-anak yang harusnya dapat tumbuh dengan baik, mengenyam pendidikan, tidak mampu merasakan semua itu.

Perlu diketahui bersama bahwa fenomena kehidupan modern dewasa ini telah melahirkan kelompok masyarakat marjinal yang hidup di jalanan. Mereka kerap disebut anak jalanan. Mereka lahir, tumbuh, dan besar di jalanan. Pendidikan yang mereka peroleh juga dari apa yang mereka lihat dan pikirkan tentang jalanan. Rumah tidak mereka miliki, bahkan kehidupan bermasyarakat pun tidak mereka pedulikan karena jalan merupakan tumpuan

⁴¹ Darmawati, *Determinasi Reistrasi Penduduk di Kota Pekanbaru*, Jurnal (Riau: 2008) Vol.VIII, No 2, h. 61-71.

⁴² <https://pekanbarukota.bps.go.id>, diakses pada tanggal 5 Mei 2019, pukul 21.43 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hidup utama mereka. Kalau dibilang mereka bermasyarakat, mereka bermasyarakat di jalanan.

Anak jalanan merupakan masalah sosial yang menjadi fenomena menarik dalam kehidupan bermasyarakat. Kita bisa menjumpai anak-anak yang sebagian besar hidupnya berada di jalanan pada berbagai titik pusat keramaian di kota besar, seperti di pasar, terminal, stasiun, *traffic light* (lampu merah), pusat perbelanjaan dan sebagainya. Kehidupan jalanan mereka terutama berhubungan dengan kegiatan ekonomi, antara lain mengamen, mengasong, kuli, loper koran, pembersih mobil, juru parkir liar dan sebagainya. Meskipun ada pula sekumpulan anak yang hanya berkeliaran atau berkumpul tanpa tujuan di jalanan.⁴³

Anak jalanan menjadi fenomena yang menuntut perhatian bagi pemerintah dan seluruh masyarakat Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru, karena anak jalanan juga mempunyai posisi penting sebagai penerus bagi keluarga maupun penerus cita-cita bangsa. Untuk menjalankan tanggung jawabnya tersebut, anak perlu mendapat perhatian khusus dan kesempatan yang besar untuk terpenuhi kebutuhannya. Hal ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dalam Pasal 20 menjelaskan bahwa “Negara, pemerintah dan masyarakat, keluarga dan orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak”.⁴⁴

⁴³ Herlina Astri, *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia: Faktor Penyebab, Tatahan Hidup, dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*, Jurnal (Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI: 2014), h.146.

⁴⁴ Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pada kenyataannya, masih banyak anak yang hidup dalam kondisi yang tidak dapat terpenuhi kebutuhannya. Situasi tersebut menyebabkan anak jalanan memiliki latar belakang masalah kehidupan yang bervariasi, persoalan yang kompleks yang dihadapi. Selain itu, anak-anak jalanan tidak mempunyai pendidikan yang tinggi karena situasi dan kondisi ekonomi. Kurangnya ilmu pengetahuan dan pendidikan yang dimiliki oleh anak jalanan dan aturan-aturan yang tidak ada pada mereka, perilaku-perilaku mereka tidak ada yang mengontrol sehingga timbul perilaku kekerasan yang dapat merugikan baik diri sendiri maupun orang lain, sehingga banyak masyarakat yang menolak jika perilaku kekerasan itu muncul.

Fenomena merebaknya anak jalanan di Indonesia khususnya di Kota Pekanbaru merupakan persoalan sosial yang kompleks. Hidup menjadi anak jalanan memang bukan merupakan pilihan yang menyenangkan, karena mereka berada dalam kondisi yang tidak bermasa depan jelas, dan keberadaan mereka tidak jarang menjadi masalah bagi banyak pihak, keluarga, masyarakat dan negara. Namun, perhatian terhadap nasib anak jalanan tampaknya belum begitu besar dan solutif. Padahal mereka adalah saudara kita. Mereka adalah amanah Allah yang harus dilindungi, dijamin hak-haknya, sehingga tumbuh-kembang menjadi manusia dewasa yang bermanfaat, beradab dan bermasa depan cerah.

Jika ditelaah lebih mendalam pada Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 pada alinea IV menjelaskan antara lain adalah “Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh rakyat Indonesia dan seluruh tumpah darah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia”⁴⁵

Hal tersebut seharusnya mendapat perhatian khusus dari pemerintahan daerah. Dalam hal ini yang bertanggung jawab dalam hal penanganan anak jalanan adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Ketentuan tersebut menunjukkan keaktifan pemerintah kita dalam memberikan hukum warga negara sesuai dengan hak-hak mereka, guna mengembangkan dan meningkatkan kesejahteraan sosialnya.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial Pasal 2 ayat (1) ditegaskan tujuan itu dapat dicapai apabila masyarakat dan negara dalam taraf kesejahteraan sosial yang sebaik-baiknya serta menyeluruh dan merata.”Kesejahteraan sosial itu sendiri dibatasi sebagai suatu tata kehidupan dan penghidupan sosial materil maupun spiritual yang diliputi oleh rasa keselamatan, kesusilaan, dan ketentraman lahir batin. Ini memungkinkan setiap warga untuk mengadakan usaha pemenuhan kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan sosial yang sebaik-baiknya bagi diri, keluarga serta masyarakat dengan menjunjung tinggi hak-hak asasi serta kewajiban manusia sesuai dengan Pancasila”⁴⁶

Menurut pandangan Islam, tidak dapat dibenarkan seseorang yang hidup ditengah masyarakat Islam, sekalipun *ahlal-dzimmah* (warga negara non-Muslim), menderita lapar, tidak berpakaian, dan membujang. Yusuf

⁴⁵ Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Alinea ke-

⁴⁶ Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Kesejahteraan Sosial



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Qardawi menyatakan bahwa biaya pengobatan dan pendidikan termasuk kebutuhan primer yang harus dipenuhi.⁴⁷

Dalam fikih Islam perbincangan mereka cukup menarik perhatian para ulama. Dalam kitab Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq disebutkan bahwa Syariat Islam memuliakan anak jalanan. Hal ini sebagai buktinya bahwa pentingnya Fiqh Siyasah di dalam pemerintahan. Dimana Fiqh Siyasah adalah yang lebih mementingkan kemaslahatan untuk rakyat umum, serta menolak segala jenis kerusakan. Fiqh Siyasah mempunyai kedudukan penting dan posisi yang strategis dalam masyarakat islam dalam memikirkan, merumuskan, dan menetapkan kebijakan-kebijakan politik praktis yang berguna bagi kemaslahatan masyarakat muslim khususnya, dan warga lain umumnya.⁴⁸

Dalam perspektif Fiqh Siyasah, permasalahan ini berkaitan dengan Siyasah Dusturiyah yang merupakan hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di dalam masyarakatnya. Sebagaimana Al-Ghazali, Ibn Taimiya berpendapat bahwa seorang pemimpin diperlukan tidak hanya untuk menjamin keselamatan jiwa dan hak milih rakyat serta terpenuhinya kebutuhan materi mereka saja, tetapi juga untuk menjamin berlakunya segala perintah dan Hukum Allah Swt.⁴⁹

⁴⁷ M.Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, (Bandung: Mizan, 1996), Cet. Ke-5, h.335.

⁴⁸ A.Djazuli, *Fiqh siyasah*, (Bandung: Kencana, 2003), h.39.

⁴⁹ Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik islam* (Jakarta: Erlangga, 2008), h.97.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Oleh karena itu dalam Fiqh Siyasah ini tugas yang terpenting dari pemerintah dalam hal ini adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru dengan adanya jaminan keamanan dan ketertiban dalam masyarakat secara berkelanjutan.

Dari uraian diatas bahwasannya Kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti undang-undang dan kemudian diundangkan dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplementasikan tetapi sebuah kebijakan publik harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dan kemudian dievaluasi pelaksanaannya. Dimana dalam hal ini penulis masih menemui kebijakan dari pemerintah Daerah Khususnya Dinas Sosial Kota Pekanbaru atas belum sepenuhnya terlaksanakan penanganan terhadap anak jalanan khususnya di Kota Pekanbaru.

Latar belakang diatas membuat penulis tertarik untuk mendalami lebih lanjut masalah efektivitas kinerja Dinas Sosial tersebut, yang hasilnya dituangkan dalam sebuah skripsi dengan judul: **"EFEKTIVITAS KINERJA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU TERKAIT PENANGANAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH"**.

B. Batasan Masalah

Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan dalam peneletian ini maka dalam hal ini perlu adanya pembatasan masalah, adapun masalah yang akan diteliti adalah tinjauan efektivitas kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait penanganan anak jalanan dan faktor yang menjadi kendala

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam hal penanganan anak jalanan Kota Pekanbaru dalam perspektif Fiqh Siyasah.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani anak jalanan menurut Undang-Undang ?
2. Bagaimana efektivitas penanganan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru terhadap penurunan jumlah anak jalanan di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait penanganan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru?

D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Berkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji dikemukakan tujuan penelitian :

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam menangani anak jalanan menurut Undang-Undang ?
- b. Untuk memahami bagaimana efektivitas penanganan terhadap jumlah penurunan anak jalanan di Kota Pekanbaru?
- c. Untuk memahami bagaimana tinjauan Fiqh Siyasah terhadap Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait penanganan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru

2. Manfaat Penelitian

- a. Untuk menambah wawasan penulis tentang kajian penelitian yang ingin dilakukan dan meningkatkan kemampuan berfikir melalui

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penulisan karya ilmiah. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi peneliti selanjutnya.

- b. Sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada konsentrasi Hukum Tata Negara (Siyasah) pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN SUSKA RIAU.

E. Metode Penelitian

Untuk menjawab permasalahan yang dikemukakan dalam penelitian ini maka penulis menyusun metode penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini bersifat sosiologi hukum dimana merupakan penelitian berupa studi-studi empiris untuk menemukan teori-teori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat. Yaitu dengan cara melakukan survey langsung kelapangan untuk mengumpulkan data primer dan disertai dengan data sekunder yang didapat langsung dari responden melalui observasi, wawancara, angket dan kajian pustaka untuk dijadikan data atau informasi sebagai bahan dalam penulisan penelitian ini.⁵⁰

2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*) yang berlokasi di Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan di Kota Pekanbaru. Selain

⁵⁰ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), h.42.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

itu lokasi tersebut sangat mudah di jangkau oleh penulis untuk melakukan observasi, wawancara, mengenai permasalahan . Hal ini juga disebabkan Kota Pekanbaru bukan hanya sebatas kota transit antar Provinsi, akan tetapi juga selalu digunakan sebagai tempat persinggahan anak jalanan .

3. Subyek dan Obyek Penelitian

- a. Yang menjadi Subyek Penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru beserta staf di lingkungannya.
- b. Yang menjadi Obyek Penelitian ini adalah efektifitas kinerja Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam menangani anak jalanan Di Kota Pekanbaru.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan ciri yang sama, yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya.⁵¹

Sampel adalah sebagian dari jumlah populasi yang memiliki sifat-sifat yang sama dari yang merupakan sumber data untuk penelitian. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan menentukan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian agar dapat menjawab masalah penelitian.

⁵¹ Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sampel dalam penelitian ini adalah 1 orang Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru , 1 orang satff Dinas Sosial Kota Pekanbaru, 1 orang Satpol PP, 1 Orang Komunitas Bahu Jalan dan 10 orang anak jalanan

5. Sumber dan Jenis data

Sumber data adalah tempat dimana dapat ditemukannya penelitian. Sumber data dibagi 2 yaitu:

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari lapangan atau objeknya. Dalam penelitian ini sumber datanya adalah data yang di peroleh langsung dari responden, kuesioner, wawancara dan kajian pustaka yang berkenaan dengan yang diteliti.
- b. Data sekekunder, adalah data yang diperoleh dengan membaca buku-buku, peraturan perundang-undangan yang erat kaitannya dengan masalah yang sedang diteliti.⁵²

6. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data-data yang diperlukan, metode pengumpulan data yang digunakan adalah:

- a. Observasi yaitu suatu studi yang dilakukan dengan sengaja atau terencana dan sistematis melalui penglihatan atau pengamatan terhadap gejala-gejala spontan yang terjadi saat itu.⁵³
- b. Wawancara yaitu situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang pewawancara mengajukan pertanyaan yang

⁵² Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Rajawali Persada, 2003), h.30.

⁵³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), h.64.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden⁵⁴.

- c. Dokumentasi adalah penelitian yang menggunakan barang-barang tertulis sebagai sumber data, misalnya buku-buku, dokumen, jurnal, peraturan, dan lainnya⁵⁵

- d. Kajian pustaka

Yaitu dengan memperbanyak sumber-sumber dari buku-buku bacaan untuk menuntaskan masalah yang diteliti oleh penulis.

7. Analisis data

Analisis data adalah cara menganalisis data penelitian, termasuk alat-alat statistik yang relevan untuk digunakan dalam penelitian. Dalam hal analisis data kualitatif, Bodgon menyatakan bahwa analisis adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami, dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain. Analisis data dilakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih nama yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan yang dapat diceritakan kepada orang lain.⁵⁶

8. Metode Penulisan

- a. Deskriptif, yaitu dengan menggambarkan subyek dan obyek penelitian berdasarkan fakta-fakta yang ada.

⁵⁴ Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, (Jakarta: Kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1, h.138.

⁵⁵ Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Nusa Media, 2011), h.62.

⁵⁶ Sugiyono, *Op Cit*. h.249.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Induktif, yaitu dengan mengambil fakta-fakta atau data-data yang berhubungan dengan penelitian, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum.
- c. Deduktif, yaitu dengan mengambil teori-teori kemudian diambil kesimpulan secara khusus.

9. Sistematika Penulisan

Agar memudahkan penulis dalam menyelesaikan tulisan ini maka, penulis membuat sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Terdiri dari Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : TINJAUAN UMUM

Tinjauan Umum berisikan tentang mengungkapkan sekilas tentang Gambaran Kota Pekanbaru dan Gambaran Dinas Sosial Kota Pekanbaru yang terdiri dari sejarah berdirinya, struktur dan mekanisme kerja, Visi, Misi dan program kerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru.

BAB III : TINJAUAN TEORITIS

Bab ini berisikan uraian tinjauan tentang Konsep Efektivitas Kinerja, Anak Jalanan yang meliputi: definisi anak jalanan, faktor penyebab munculnya anak jalanan, karakteristik anak jalanan, dan tinjauan fiqh siyasah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis membahas tentang bagaimana peran Dinas Sosial Kota Pekanbaru terkait penanganan terhadap Anak Jalanan di Kota Pekanbaru, bagaimana efektivitas penanganan yang dilakukan Dinas Sosial terhadap penurunan jumlah anak jalanan, dan tinjauan Fiqh Siyasah terhadap penanganan Anak Jalanan

BAB V : PENUTUP

Pada bab ini penulis menguraikan kesimpulan dan saran yang diambil berdasarkan uraian pada bab sebelumnya.



 UIN SUSKA RIAU



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Sejarah Singkat Kota Pekanbaru

Nama Pekanbaru dahulunya dikenal dengan nama Senapelan yang pada saat itu dipimpin oleh seorang Kepala Suku disebut Batin. Daerah yang mulanya sebagai ladang, lambat laun menjadi perkampungan. Kemudian perkampungan Senapelan berpindah ke tempat pemukiman baru yang kemudian disebut Dusun Payung Sekaki yang terletak di tepi muara sungai Siak.

Nama Payung Sekaki tidak begitu dikenal pada masanya melainkan Senapelan. Perkembangan Senapelan berhubungan erat dengan perkembangan Kerajaan Siak Sri Indrapura. Semenjak Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah menetap di Senapelan, beliau membangun istananya di Kampung Bukit berdekatan dengan perkampungan Senapelan. Diperkirakan istana tersebut terletak di sekitar Mesjid Raya sekarang. Sultan Abdul Jalil Alamudin Syah mempunyai inisiatif untuk membuat Pekan di Senapelan tetapi tidak berkembang. Usaha yang telah dirintis tersebut kemudian dilanjutkan oleh putranya Raja Muda Muhammad Ali di tempat baru yaitu disekitar pelabuhan sekarang.

Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 21 Rajab 1204 H atau tanggal 23 Juni 1784 M berdasarkan musyawarah datuk-datuk empat suku (Pesisir, Lima Puluh, Tanah Datar dan Kampar), negeri Senapelan diganti namanya menjadi **Pekan Baharu** selanjutnya diperingati sebagai hari lahir Kota

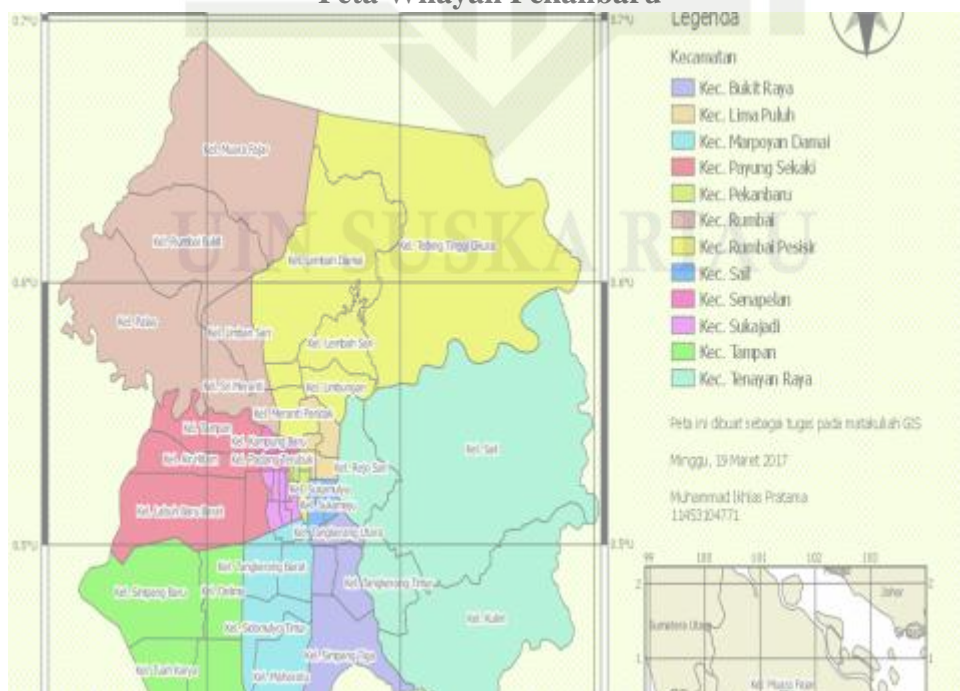
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dianggap mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dianggap mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Demografi Kota Pekanbaru

Kota Pekanbaru sebagai ibu kota Provinsi Riau telah berkembang dengan pesat seiring dengan kemajuan pembangunan dewasa ini. Secara administrasi kota Pekanbaru di pimpin oleh Walikota dan bertanggung jawab langsung kepada Gubernur sebagai kepada Daerah Tingkat I Riau. Kota Pekanbaru didalam melaksanakan roda pemerintahan dan pembangunan menjadi harapan untuk dapat menjawab setiap permasalahan dan tantangan yang muncul sesuai dengan perkembangan social ekonomi, politik dan lainnya dalam masyarakat. Berikut peta

Gambar II.1
Peta Wilayah Pekanbaru



Sumber: Google, 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara geografis kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatra, terhubung dengan beberapa kota seperti Medan, Padang, dan Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian utara dan timur, sementara bagian barat dan selatan oleh Kabupaten Kampar. Dengan meningkatnya kegiatan pembangunan menyebabkan meningkatnya kegiatan penduduk disegala bidang yang akhirnya meningkatkan pula tuntutan dan kebutuhan masyarakat. Keberadaan kota Pekanbaru merupakan dasar dekonsentrasi sebagaimana dimaksud dalam perda Kota Pekanbaru No. 4 Tahun 2016, kota Pekanbaru di bagi atas 12 (dua belas) kecamatan.

Masalah penduduk di kota Pekanbaru sama halnya seperti daerah lain di Indonesia. Untuk mencapai manusia yang berkualitas. Pada tahun 2014, Pekanbaru telah menjadi kota keempat berpenduduk terbanyak di Pulau Sumatra, setelah Medan dan Palembang. Laju pertumbuhan ekonomi Pekanbaru yang cukup pesat, menjadi pendorong laju pertumbuhan penduduknya. Etnis Minagkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 40,96% dari total penduduk kota. Mereka umumnya bekerja sebagai professional dan pedagang. Populasi yang cukup besar telah mengantarkan bahasa Minang sebagai bahasa pergaulan yang umumnya digunakan oleh penduduk kota Pekanbaru, selain bahasa Indonesia.

Selain itu, etnis yang cukup memiliki proporsi cukup besar adalah Melayu, Jawa, Tionghoa, dan Batak. Perpindahan ibu kota Provinsi Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru tahun 1959, memiliki andil cukup besar menempatkan suku Melayu mendominasi struktur birokrasi pemerintahan kota, namun sejak tahun 2002 hegemoni mereka berkurang seiring dengan berdirinya Provinsi Kepulauan Riau dari pemekaran Provinsi Riau. Masyarakat Tionghoa Pekanbaru pada umumnya merupakan pengusaha, pedagang, dan pelaku ekonomi. Hal ini sejalan dengan perkembangannya industri terutama yang berkaitan dengan minyak bumi, membuka banyak peluang pekerjaan, hal ini juga menjadi pendorong berdatangnya masyarakat dari berbagai provinsi.⁵⁷

B. Dinas Sosial Kota Pekanbaru

1. Sejarah Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Dinas Sosial Kota Pekanbaru merupakan salah satu Dinas yang ada di Kota Pekanbaru yang tugasnya berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Dinas Sosial Kota Pekanbaru beralamat di Jl.Datuk Setia Maharaja Tengkerang Selatan, Kecamatan Bukit Raya, Kota Pekanbaru, Riau . Dengan kode pos 28128. Jam Operasional Senin hingga Jum'at dari pukul 08.00 WIB hingga pukul 16.00 WIB.

Setelah Indonesia merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, bukan berarti Indonesia telah merdeka seutuhnya dan merasa aman dari penjajah. Belanda ternyata tidak ingin melepas begitu saja jajahannya meski Indonesia telah memproklamkan kemerdekaan. Dengan maksud ingin

⁵⁷ Badan Pusat Statistik, *Kota Pekanbaru Dalam Angka 2019*, dari <https://pekanbarukota.bps.go.id> diakses, pada tanggal 27 Desember 2019 pukul 20.00 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

menjajah kembali Indonesia maka Belanda dengan kekuatan penuh pasukan tempurnya kembali ingin menguasai Indonesia.

Terjadilah pertempuran yang sangat sengit antara dua bangsa yang berbeda tujuan dan keinginan. Di dalam pertempuran ini banyak terjadi kekacauan, sehingga banyak rakyat yang mengungsi. Oleh pejuang yang berada digaris belakang maka dikoordinirlah para relawan yang membantu para pejuang dan pengungsi ini. Tugas para relawan adalah membuat dapur umum, menyuplai logistic dan makanan serta pekerjaan lainnya yang dibutuhkan pada saat itu. Dampak peristiwa ini menumbuhkan perasaan hubungan yang emosional dan persaudaraan yang kental antara pejuang, pengungsi, relawan dan orang-orang yang terlibat dalam peristiwa pertempuran tersebut. Peristiwa ini kemudian disebut sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial yang jatuh pada tanggal 22 Desember 1947 yang cikal bakal lahirnya Departemen Sosial. Hingga kini pemerintah Negara Republik Indonesia setiap tanggal 22 Desember diperingati sebagai Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) atau hari jadi Departemen Sosial.

Pada tahun 1948 pemerintah Negara Republik Indonesia yang baru berdiri dan sedang dilanda perang merasakan perlunya suatu instansi yang sah yang dikelola oleh pemerintah dalam rangka membantu peperangan, maka pada tahun itu dibentuklah yang namanya Inspeksi Sosial mulai dari pusat sampai ke daerah daerah yang tugas pokoknya adalah membantu tentara Republik Indonesia dalam peperangan. Kemudian pada tahun 1950

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Inspeksi Sosial ditukar namanya menjadi Jawatan Sosial yang tugas pokoknya adalah membantu korban perang dan para veteran pejuang. Kemudian pada tahun 1965 Jawatan Sosial yang tugas utamanya adalah membantu para korban perang dan veteran pejuang ditambah tugas pokoknya dengan membantu para penyandang cacat (paca), Tenaga Kerja Indonesia, dan Organisasi Sosial (orsos).

Pada tahun 1974 Jawatan Sosial diganti nama menjadi Departemen Sosial Republik Indonesia untuk tingkat pusat yang dikepalai oleh seorang Menteri Republik Indonesia, untuk tingkat provinsi disebut Kantor Wilayah (Kanwil) Departemen Sosial Provinsi yang dikepalai oleh seorang kepala departemen, sementara untuk tingkat kabupaten/kota disebut Kantor Departemen Sosial Kabupaten/Kota, untuk tingkat kecamatan disebut Petugas Sosial Kecamatan yang berkantor di kantor camat setempat. Tugas utama dari Departemen Sosial adalah perintis pejuang kemerdekaan, mengangkat pahlawan nasional, penyandang cacat, karang taruna, panti asuhan, fakir miskin, korban bencana, lembaga sosial, organisasi sosial, korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, korban perdagangan anak, gelandangan dan pengemis (gepeng), pekerja seks komersil (psk), korban HIV/AIDS, korban napza, komunitas adat terpencil.

Pada tahun 1998, Departemen Sosial pernah dibubarkan oleh Presiden Republik Indonesia yang pada saat itu dijabat oleh KH.Abdurrahman Wahid atau Gusdur, dengan alasan yang tidak jelas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dan pada tahun 1999, dihidupkan kembali Departemen Sosial dengan berganti nama menjadi Badan Kesejahteraan Sosial Nasional (BKSNN) untuk tingkat pusat. Kemudian pada tahun 2000 diganti kembali dengan nama Departemen Sosial dan Kesehatan Republik Indonesia.

Selanjutnya pada tahun 2001 Departemen Sosial Republik Indonesia dihidupkan kembali oleh Presiden yang pada waktu itu dijabat oleh Megawati Soekarno Putri. Pada tahun itu juga untuk Kota Pekanbaru sesuai dengan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas, maka terbentuklah Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru berdasarkan Peraturan Daerah Kota Nomor 7 Tahun 2011.

Pada tahun 2008 Pemerintah Kota Pekanbaru mengeluarkan Perda Nomor 8 Tahun 2008 tentang Struktur dan Tata Kerja yang baru untuk Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru adalah unsure pelaksana pemerintah daerah dibidang Kesejahteraan Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru yang pada saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan terdiri dari 1 sekretaris dan 4 Kepala Bidang (Kabid), 15 Kepala Seksi (Kasi) dan tenaga jabatan fungsional dengan jumlah personil 59 orang yang dilatarbelakangi dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda, dalam pelaksanaan Peraturan Pemerintah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001 sehari-hari berada di bawah tanggung jawab Walikota melalui Sekretaris Kota Pekanbaru .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kedudukan Dinas Sosial dan Pemakaman sesuai dengan tuntutan Undang-Undang Otonomi Daerah Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dimana kabupaten/kota diberikan wewenang yang luas baik dalam urusan pemerintahan maupun dalam pengelolaan pembangunan. Kewenangan yang luas ini disatu sisi dapat dipandang sebagai kesempatan bagi daerah untuk berkembang dan berbuat sendiri demi kemajuan suatu daerah tersebut, dan disisi lain merupakan tantangan baru yang cukup berat dan menantang. Kemudian untuk menunjang pelaksanaan pelayanan penyediaan tempat pemakaman umum di Kota Pekanbaru, maka oleh pemerintah Kota Pekanbaru pada tahun 2004 dibuatkanlah 6 (enam) tempat pemakaman umum yang tersebar di sekitar Kota Pekanbaru yang tata kelolanya diatur dan ditangani oleh Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru. Namun sekarang namanya berubah menjadi Dinas Sosial Pekanbaru.⁵⁸

2. Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Setiap organisasi atau instansi pemerintah diharuskan mempunyai suatu pandangan dan pencapaian ke depannya dalam menangani dan melaksanakan pekerjaannya dalam arti kata adanya visi dan misi, supaya apa yang dilaksanakan itu terstruktur, strategis dan tetap pada pedoman yang telah ditetapkan. Penetapan visi sebagai bagian dari perencanaan strategis, merupakan suatu langkah penting dalam perjalanan suatu

⁵⁸ <https://www.brosispku.com>dinasosialdanpemakamankotapekanbaru>, diakses pada tanggal 20 Oktober 2019 pukul 13.21 WIB

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

organisasi. Visi tidak hanya penting pada waktu mulai bekerja, tetapi juga pada kehidupan organisasi selanjutnya.

Adapun visi dan misi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru di antaranya sebagai berikut :

a. Visi

Sebagaimana yang telah dirumuskan bersama, bahwa visi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah “Terwujudnya Kesejahteraan Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang didukung oleh sumber daya penyelenggara kesejahteraan sosial dan peran masyarakat serta pemakaman yang bersih, tertib dan indah”.

b. Misi

Dari visi di atas, dapat dirumuskan misi dari Dinas Sosial Kota Pekanbaru sebagai berikut :⁵⁹

- 1) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan terhadap PMKS
- 2) Mengembangkan sistem jaminan sosial bagi PMKS secara berkelanjutan.
- 3) Pemberdayaan sosial bagi PMKS agar mampu memenuhi kebutuhan secara mandiri.
- 4) Meningkatkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana penyelenggaraan kesejahteraan sosial.
- 5) Meningkatkan sumber daya penyelenggara Kesejahteraan Sosial

⁵⁹ Sumber: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Meningkatkan dan mengembangkan sumber pendapatan sesuai ketentuan yang berlaku.
- 7) Mewujudkan pemakaman yang bersih, tertib dan indah.

Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian urusan pemerintahan daerah kota dibidang Kesejahteraan Sosial dan pemakaman. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut sesuai dengan peraturan walikota Pekanbaru Nomor 17 tahun 2008 Bab V pasal 98, Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai tugas pokok dan fungsinya sebagai berikut:

Melakukan pelaksanaan pembinaan Kewenangan dibidang kesejahteraan Sosial dan pemakaman yang ditetapkan oleh Wali Kota Pekanbaru.

- 1) Penyusunan pelaksanaan rencana program dibidang pembinaan teknis kesejahteraan Sosial di kota Pekanbaru.
- 2) Melakukan Pengelolaan, penyelenggaraan dan penyuluhan Usaha Kesejahteraan Sosial di Kota Pekanbaru.
- 3) Pelaksanaan Pembinaan, pelatihan ketrampilan dan pemberian bantuan kepada klien untuk usaha kesejahteraan Sosial.
- 4) Melakukan Pengawasan, pengendalian dan pemantauan kepada klien yang telah dilatih dan diberi bantuan.
- 5) Pengelolaan dan pengolahan serta pengumpulan data dan informasi serta evaluasi Kegiatan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), potensi dan sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 6) Pelaksanaan koordinasi antar instansi terkait, lembaga-lembaga dan organisasi masyarakat yang menyelenggarakan kegiatan usaha kesejahteraan sosial (UKS).
- 7) Pengelolaan administrasi umum, meliputi ketatalaksanaan, keuangan, kepegawaian, peralatan dan perlengkapan.
- 8) Pengelolaan kegiatan usaha kesejahteraan sosial melalui petugas sosial, pekerja sosial, pengurus karang taruna dan lembaga sosial masyarakat di kelurahan/desa.
- 9) Pengelolaan kegiatan pemakaman dan penertiban lahan-lahan pemakaman dari seluruh kecamatan dan kelurahan.

3. Struktur Organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Susunan organisasi Dinas Sosial Kota Pekanbaru adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris
 - 1) Sub Bagian Kepegawaian, Umum dan Perlengkapan
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Penyusunan Program
- c. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan Sosial
 - 1) Seksi Kesejahteraan Anak, Keluarga, dan Lansia
 - 2) Seksi Pemberdayaan Keluarga Miskin
 - 3) Seksi Lembaga dan Penyuluhan Sosial
- d. Bidang Rehabilitas Sosial
 - 1) Seksi Rehabilitas Anak Nakal, Eks Narkoba Nafza dan Hukuman

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Seksi Rehabilitas dan Pemberdayaan Penyandang Cacat
- 3) Seksi Rehabilitas Tuna Sosial

e. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial

- 1) Seksi Bantuan Sosial dan Korban Bencana
- 2) Seksi HAM, Pahlawan dan Perintis Kemerdekaan
- 3) Seksi Pengendalian, Pengawasan, dan Pengumpulan dan Sosial

Struktur organisasi berlaku selama 7 bulan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru dan kemudian keluar Peraturan Daerah No 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan susunan organisasi kedudukan dan tugas pokok Dinas-dinas di lingkungan pemerintah Kota Pekanbaru oleh Walikota, struktur organisasi kebutuhan dan tugas pokok Dinas-dinas di lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru.

a. Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru mempunyai rincian tugas :

- 1) Merumuskan kebijakan teknis dalam bidang sosial dan pemakaman.
- 2) Menyelenggarakan urusan pemerintah dan pelayanan umum dibidang sosial dan pemakaman.
- 3) Membina dan melaksanakan urusan bidang sosial dan pemakaman, membina unit pelaksanaan teknis Dinas dalam lingkup tugasnya.
- 4) Menyelenggarakan urusan penatausahaan Dinas.
- 5) Melaksanakan Tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kepala Dinas Sosial Kota Pekanbaru dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi:

- 1) Perumusan kebijakan teknis dibidang sosial dan pemakaman.
 - 2) Penyelenggaraan urusan pemerintah dan pelayanan umum.
 - 3) Penyusunan rencana kerja, pemantauan dan evaluasi.
 - 4) Pembinaan dan pelaporan
 - 5) Penyelenggaraan urusan penatausahaan Dinas
 - 6) Pelaksanaan tugas-tugas lain.
- b. Sekretariat mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
- 1) Memimpin, menyelenggarakan kegiatan administrasi kepegawaian, umum, perlengkapan, keuangan, dan program dinas.
 - 2) Menyusun rencana kerja dan membuat laporan tahunan.
 - 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan program kerja tahunan dilingkungan Dinas.
 - 4) Mewakili Kepala Dinas apabila yang bersangkutan berhalangan atau tidak berada ditempat.
 - 5) Mengkoordinasikan dan mengarahkan kegiatan sub bagian
 - 6) Mengkoordinasikan dan melaksanakan pelayanan dan pengaturan rapat dinas, upacara serta keprotokolan.
 - 7) Mengkoordinasikan, membina, merumuskan laporan tahunan dan evaluasi setiap bidang sebagai pertanggung jawaban Dinas.
 - 8) Mengkoordinasikan, membina pemeliharaan kebersihan, ketertiban, dan keamanan kantor.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 9) Membagi tugas pada bawahan dengan cara disposisi atau
- 10) Secara lisan agar bawahan mengetahui tugas dan tanggung jawab masing-masing.
- 11) Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- 12) Melaporkan pelaksanaan tugas sekretariat kepada atasan secara lisan maupun tertulis.
- 13) Memfasilitasi dan asistensi tugas sekretariat dengan cara konsultasi, kunjungan kerja, sosialisasi dan bimbingan teknis.
- 14) Mengevaluasi tugas sekretariat berdasarkan informasi, data, laporan yang diterima untuk bahan penyempurnaan lebih lanjut.
- 15) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja dinas
- 2) Penyelenggaraan pelayanan administrasi, keuangan, kepegawaian, tata peraturan, perlengkapan, umum dan rumah tangga.
- 3) Pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi dinas.
- 4) Pengkoordinasian rapat dan keprotokolan.
- 5) Pengkoordinasian laporan tahunan.
- 6) Pengkoordinasian kebersihan, keindahan, dan ketertiban kantor.
- 7) Pelaksanaan tugas-tugas lain.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Bidang Pelayanan dan Pemberdayaan sosial mempunyai rincian tugas sebagai berikut:
 - 1) Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pembinaan dan pengendalian serta pelayanan kesejahteraan sosial dibidang kesejahteraan anak, keluarga, lanjut usia, dan jompo, bimbingan keluarga miskin, pemberdayaan lembaga-lembaga sosial termasuk pengawasan terhadap panti sosial, penyuluhan sosial serta jaminan sosial.
 - 2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial.
 - 3) Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan inventarisasi data peyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) dan potensi serta sumber-sumber kesejahteraan sosial (PSKS) dibidang tugasnya.
 - 4) Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan penyiapan dan pengumpulan bahan dalam rangka penyusunan kegiatan penyuluhan, bimbingan sosial dan pengembangan swadaya masyarakat dibidang kesejahteraan sosial.
 - 5) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit kerja lain serta instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
 - 6) Mengkoordinasikan, membina dan menyusun laporan dan hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugasnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 7) Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan pelaksanaan tugas lain atas petunjuk pimpinan.
- 8) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang pelayanan dan pemberdayaan sosial dalam melaksanakan rincian tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja
 - 2) Membina dan merumuskan bimbingan teknis dan pengendalian program pelayanan sosial dan pemberdayaan sosial.
 - 3) Pengkoordinasian inventaris data penyandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS).
 - 4) Pengumpulan bahan kegiatan penyuluhan.
 - 5) Pelaksanaan tugas-tugas lain.
- d. Bidang Rehabilitas Sosial mempunyai rincian tugas-tugas sebagai berikut:
- 1) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan penyiapan bahan pelaksanaan pembinaan dan bimbingan dibidang rehabilitas sosial.
 - 2) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan pelaksanaan pembinaan lanjut, pelayanan sosial, pemberdayaan bagi penyandang cacat, anak terlantar atau anak nakal, eks korban Napza, bebas hukuman dan tuna susila.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 3) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan kerjasama dengan unit lain dan instansi terkait sesuai dengan bidang tugasnya.
- 4) Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan dan menyusun laporan, hasil-hasil yang dicapai dalam pelaksanaan tugas.
- 5) Mengkoordinasikan, membina, dan merumuskan rencana kegiatan bidang.
- 6) Mengkoordinasikan, membina dan merumuskan rencana kegiatan bidang.
- 7) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Rehabilitas Sosial dan melaksanakan rincin tugas sebagaimana dimaksud juga menyelenggarakan fungsi:

- 1) Penyusunan program kerja
- 2) Pembinaan lanjut, pelayanan sosial
- 3) Pelaksanaan tugas-tugas lain.⁶⁰

4. Identifikasi Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Ada beberapa hal yang perlu diketahui bahwa identifikasi pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru berdasarkan jenis kelamin dan latar belakang pendidikannya sebagai berikut.

⁶⁰ *Ibid*



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel II.1
Data Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru

No	Jenis Kelamin	Jumlah(Orang)
1.	Laki-Laki	15
2.	Perempuan	15
Jumlah		30

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah pegawai pada Dinas Sosial Kota Pekanbaru berjumlah 30 orang yang terdiri dari perempuan sebanyak 15 orang dan Laki-laki berjumlah 15 orang.

Peningkatan kinerja pada setiap pegawai di Dinas Sosial Kota Pekanbaru diharapkan bisa bekerja lebih efektif dan efisien dengan jumlah pegawai yang ada tersebut sehingga bidang rehabilitas sosial terus mengalami peningkatan dan perubahan untuk mencapai tujuan.

Tabel II.II
Data Latar Belakang Pendidikan Pegawai Dinas Sosial Kota Pekanbaru

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah (Orang)
1.	SLTA	7
2.	D3	1
3.	S1	15
4.	S2	7
Jumlah		30

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2019

Berdasarkan tabel diatas dapat terlihat bahwa pada kantor Dinas Sosial Kota Pekanbaru banyak didominasi oleh pegawai yang tingkatan lumayan tinggi yaitu S1 berjumlah 15 orang, tetapi yang berpendidikan SLTA berjumlah 7 orang, berpendidikan D3 berjumlah 1 orang, dan yang berpendidikan S2 berjumlah 7 orang . Hal ini harus diperhatikan untuk dapat mewujudkan pengelolaan yang baik.

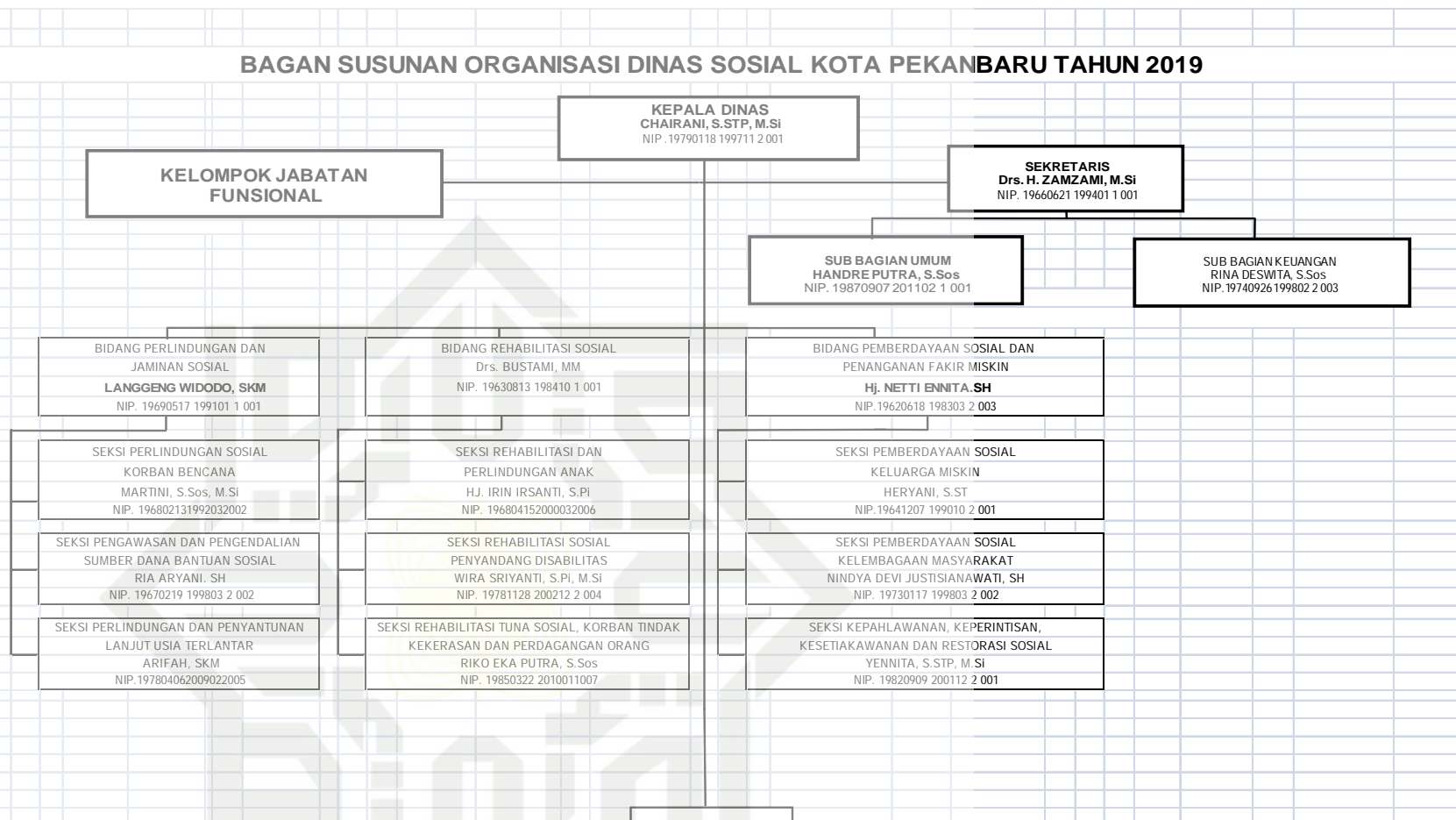
5. Bagan Susunan Dinas Sosial Kota Pekanbaru

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of S

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumunkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

TINJAUAN TEOROTIS

A. Konsep Eektivitas Kinerja

1. Pengertian Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target dapat tercapai. Pengertian efektivitas ini lebih berorientasi kepada keluaran sedangkan masalah penggunaan masalah masukan kurang menjadi perhatian utama. Pendapat tersebut menyatakan bahwa efektivitas merupakan suatu ukuran yang memberikan gambaran seberapa jauh target yang telah ditetapkan sebelumnya oleh lembaga atau organisasi dapat tercapai. Hal tersebut sangat penting peranannya didalam setiap lembaga atau organisasi dan berguna untuk melihat perkembangan dan kemajuan yang dicapai oleh suatu lembaga atau organisasi itu sendiri.³²

Setiap organisasi atau lembaga didalam kegiatannya menginginkan adanya pencapaian tujuan. Tujuan dari suatu lembaga akan tercapai segala

³² Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju, 2009), h.59.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatannyadengan berjalan efektif akan dapat dilaksanakan apabila didukung oleh faktor-faktor pendukung efektivitas.

2. Pengertian Kinerja

Kinerja apabila dikaitkan dengan *performance* sebagai kata benda (*noun*), maka pengertian *performance* atau kinerja adalah hasil kerja yang dapat dicapai oleh seseorang atau kelompok orang dalam suatu lembaga sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing dalam upaya pencapaian tujuan perusahaan secara ilegal, tidak melanggar hukum dan tidak bertentangan dengan moral dan etika.

Kinerja adalah sejauh mana seseorang telah memainkan baginya dalam melaksanakan strategi organisasi, baik dalam mencapai sasaran khusus yang berhubungan dengan peran perorangan dan atau memperlihatkan kompetensi yang dinyatakan relevan bagi organisasi. Kinerja adalah suatu konsep yang multi dimensional mencakup tiga aspek yaitu sikap (*attitide*), kemampuan (*ability*), dan prestasi (*accomplishment*).³³

3. Ukuran Efektivitas Kinerja

Mengukur efektivitas orrganisasi atau lembaga bukanlah hal yang sangat sederhana, karena efektivitas dapat dikaji dari berbagai sudut pandang dan tergantung pada siapa yang menilai serta menginterprestasikannya. Tingkat efektifitas dapat diukur dengan membandingkan antara rencana yang telah ditentukan dengan hasil nyata yang telah diwujudkan. Namun, jika usaha atau hasil pekerjaan dan

³³ Pandi Afandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta: Zanafa Publishing, 2018), h.83.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tindakan yang dilakukan tidak tepat, sehingga menyebabkan tujuan tidak tercapai atau sasaran yang diharapkan, maka hal itu dikatakan tidak efektif.

Ada beberapa indikator kinerja untuk dijadikan pedoman dalam menilai kinerja organisasi atau lembaga yang salah satunya adalah efektivitas. Efektivitas dapat terwujud apabila tujuan yang didirikan organisasi pelayanan publik tersebut tercapai. Hal tersebut erat kaitannya dengan rasionalitas teknis, nilai, visi, misi, tujuan organisasi serta fungsi agen pembangunan.

Dalam permasalahan ini, yang menjadi sebuah lembaga nya adalah Dinas Sosial Kota Pekanbaru. Dimana ukuran tingkat efektivitasnya diukur dari tercapainya Visi dan Misi Dinas Sosial Kota Pekanbaru tersebut. Jika kegiatan yang dilakukan tidak terwujud sesuai dengan Visi Misi tersebut, maka hal itulah yang dikatakan tidak efektif.

B. Anak Jalanan

1. Pengertian Anak

Merujuk dari Kamus Umum Bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa.³⁴ Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan

³⁴ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka: Amirko, 1984), h. 25.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.³⁵

Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Convention on the Right of the Child* (CRC) atau KHA menetapkan definisi anak: “Anak berarti setiap manusia dibawah umur 18 tahun, kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal.”³⁶

Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 mengenai Perlindungan Anak, Pasal 1 menyebutkan bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.³⁷ Semestinya setelah lahir Undang-Undang Perlindungan Anak yang dalam strata hukum dikategorikan sebagai *lex specialist*, semua ketentuan lainnya tentang definisi anak harus disesuaikan, termasuk kebijakan yang dilahirkan yang berkaitan dengan pemenuhan hak anak.

2. Pengertian Jalanan

Jalan adalah jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum, untuk keperluan pengaturan penggunaan dan pemenuhan kebutuhan angkutan. Jalan juga merupakan salah satu prasarana perhubungan yang berperan penting untuk mempermudah arus transportasi. Jalanan adalah tempat beraktifitasnya anak jalanan,

³⁵ R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005), h. 113.

³⁶ Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidaan*, (Jakarta: PT Gramedia, 2010), h. 40.

³⁷ Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

gelandangan dan pengemis, dan pedagang kaki lima dan lainnya untuk mencari rezeki³⁸.

3. Pengertian Anak Jalanan

Istilah anak jalanan pertama kali diperkenalkan di Amerika selatan, tepatnya di Brazilia, dengan nama *Meninos de Ruas* untuk menyebut kelompok anak-anak yang hidup di jalanan dan tidak memiliki ikatan dengan keluarga. Istilah anak jalanan berbeda-beda untuk setiap tempat, misalnya di Columbia mereka disebut “*gamin*” (*urchin* atau melarat) dan “*chinces*” (kutu kasur), “*marginais*” (*criminal* atau marjinal) di Rio, “*pa’jaros frutero*” (perampok kecil) di Peru, “*polillas*” (ngrengat) di Bolivia, “*resistoleros*” (perampok kecil) di Honduras, “*Bui Doi*” (anak dekil) di Vietnam, “*saligoman*” (anak menjijikkan) di Rwanda. Istilah-istilah itu sebenarnya menggambarkan bagaimana posisi anak-anak jalanan ini dalam masyarakat.³⁹

Anak jalanan, umumnya berasal dari keluarga yang pekerjaannya berat dan ekonominya lemah. Anak jalanan tumbuh dan berkembang dengan latar kehidupan jalanan dan akrab dengan kemiskinan, penganiayaan, dan hilangnya kasih sayang, sehingga memberatkan jiwa dan membuatnya berperilaku negatif.

Umumnya anak jalanan bekerja sebagai pengasong, pemulung, tukang semir, pelacur anak dan pengais sampah. Tidak jarang menghadapi

³⁸ <https://id.m.wikipedia.org/wiki/jalan> diakses pada tanggal 22 October 2019 Pukul 16.35 WIB

³⁹ Rif’atin Ni’marohah, *Upaya Rumah Belajar Pandawa dalam mengembangkan Emosional Spiritual Quotient (ESQ) (Studi Kasus Anak Jalanan di Ngagel Wonokromo Surabaya)* Skripsi. (Surabaya: IAIN Sunan Ampel, 2012), h. 20.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

resiko kecelakaan lalu lintas, pemerasan, perkelahian, dan kekerasan lain. Anak jalanan lebih mudah tertular kebiasaan tidak sehat dari kultur jalanan, khususnya seks bebas dan penyalahgunaan obat.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2013 anak jalanan adalah anak yang kehidupannya tidak teratur dengan menghabiskan sebagian besar waktunya di luar rumah untuk mencari nafkah di jalanan atau di tempat umum.⁴⁰ Mereka itu ada yang tinggal di kota setempat, di kota lain terdekat, atau di provinsi lain. Ada anak jalanan yang ibunya tinggal di kota berbeda dengan tempat tinggal ayahnya karena pekerjaan, menikah lagi, atau cerai. Ada anak jalanan yang masih tinggal bersama keluarga, ada yang terpisah tetapi masih sering pulang ke tempat keluarga, ada yang sama sekali tidak pernah tinggal bersama keluarganya atau bahkan ada anak tak mengenal keluarganya.

UNICEF mendefinisikan anak jalanan sebagai *those who have abandoned their home, school, and immediate communities before they are sixteen years of age have drifted into a nomadic street life* (anak-anak berumur di bawah 16 tahun yang sudah melepaskan diri dari keluarga, sekolah dan lingkungan masyarakat terdekat, larut dalam kehidupan yang berpindah-pindah).⁴¹ Anak jalanan merupakan anak yang sebagian besar menghabiskan waktunya untuk mencari nafkah atau berkeliaran di jalanan atau tempat-tempat umum lainnya.

⁴⁰ Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013

⁴¹ Rif'atin Ni'marohah, *Upaya Rumah Belajar...*, opcit. h. 21

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hidup menjadi anak jalanan bukanlah pilihan yang menyenangkan, melainkan keterpaksaan yang harus mereka terima karena adanya sebab tertentu. Secara psikologis mereka adalah anak-anak yang pada taraf tertentu belum mempunyai bentukan mental emosional yang kokoh, sementara pada saat yang sama mereka harus bergelut dengan dunia jalanan yang keras dan cenderung berpengaruh bagi perkembangan dan pembentukan kepribadiannya. Aspek psikologis ini berdampak kuat pada aspek sosial. Penampilan anak jalanan yang kumuh, melahirkan pencitraan negatif oleh sebagian besar masyarakat terhadap anak jalanan yang diidentikan dengan pembuat onar, anak-anak kumuh, suka mencuri, dan sampah masyarakat yang harus diasingkan.

Anak jalanan, atau disebut juga sebagai *eufimistis* sebagai anak mandiri, sesungguhnya mereka adalah anak yang tersisih, marginal, dan terealienasi dari perlakuan kasih sayang. Kebanyakan dalam usia yang relatif dini mereka sudah harus berhadapan dengan lingkungan kota yang keras, dan bahkan sangat tidak bersahabat. Di berbagai sudut kota, sering terjadi anak jalanan harus bertahan hidup dengan cara-cara yang secara sosial kurang atau bahkan tidak diterima masyarakat. Marginal, rentan dan eksploitatif adalah menggambarkan kondisi dan kehidupan anak jalanan. Marginal karena mereka melakukan jenis pekerjaan yang tidak jelas jenjang karirnya, kurang dihargai, dan umumnya juga tidak menjanjikan prospek apapun di masa depan. Rentan karena resiko yang harus ditanggung akibat jam kerja yang sangat panjang dari segi kesehatannya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maupun sosial. Adapun disebut eksploitatif karena mereka biasanya memiliki posisi tawar – menawar (*bargaining position*) yang sangat lemah, dan cenderung menjadi objek perlakuan yang sewenang-wenang dari keluarga, ulah preman, atau oknum yang tidak bertanggung jawab.⁴²

Dari beberapa pengertian tersebut, pada hakikatnya apapun definisi mengenai anak jalanan adalah sama. Anak jalanan merupakan seseorang maupun sekumpulan anak yang menghabiskan waktunya di jalanan, baik untuk mencari nafkah maupun hanya untuk berkeliaran di jalanan.

4. Latar Belakang Anak Jalanan

Rata-rata anak jalanan mengaku pergi ke jalan merupakan keinginan diri sendiri, namun demikian motif tersebut bukanlah semata-mata motif biologis yang muncul dari dalam diri mereka melainkan juga di dorong oleh faktor lingkungan. Menurut kalangan LSM peduli anak, beberapa penyebab anak turun ke jalanan ialah *Pertama*, kondisi ekonomi keluarga yang miskin seringkali dipahami sebagai faktor utama yang memaksa anak turun ke jalan. *Kedua*, kekerasan dalam keluarga. Kekerasan yang terjadi dalam keluarga menjadi faktor penting yang mendorong anak untuk turun ke jalan. Hal ini bisa terjadi ketika keluarga mengalami berbagai masalah akibat beban ekonomi tidak tertahankan. Sebagian atau seluruh masalah keluarga itu kemudian terpaksa dibebankan kepada anak-anak mereka. *Ketiga*, faktor lingkungan terbukti juga menjadi penyebab anak turun ke jalanan. Tidak sedikit anak dipaksa lingkungan

⁴² Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak* (Jakarta: Prenada Media Grup, 2010), h.185.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk turun ke jalan. Ada kalanya sebelum terpengaruh factor lingkungan, seorang anak memang berasal dari keluarga miskin, sehingga factor lingkungan, seperti diajak teman atau bermasalah di sekolah, menjadi penguat alasan untuk turun ke jalan.⁴³

Hal senada juga diungkapkan oleh Saparinah Sadli bahwa ada berbagai faktor yang saling berkaitan dan berpengaruh terhadap timbulnya masalah anak jalanan, antara lain : faktor kemiskinan (*structural*), faktor keterbatasan kesempatan kerja (*factor intern* dan *ekstern*), faktor yang berhubungan dengan urbanisasi dan masih ditambah lagi dengan faktor pribadi seperti tidak biasa disiplin, biasa hidup sesuai dengan keinginannya sendiri dan berbagai faktor lainnya.

Selain disebutkan sebelumnya, Ada beberapa aspek yang melatarbelakangi munculnya anak jalanan di beberapa kota besar yang ada di Indonesia, yaitu aspek sosial ekonomi. Untuk mengetahui sosial ekonomi keluarga, maka perlu diketahui aspek apa saja yang mendukung, sehingga bisa diketahui suatu kondisi sosial ekonomi keluarga. Aspek sosial ekonomi yang dimaksud di sini adalah pendidikan, pekerjaan dan pendapatan (ekonomi), juga faktor tradisi.

1. Pendidikan

Pendidikan merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Oleh sebab itu, dengan pendidikan diharapkan agar setiap masyarakat bisa menggunakan akal

⁴³ *Ibid*, h.196.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pikirannya secara sehat, sebagai upaya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Dijelaskan bahwasanya pendidikan merupakan suatu usaha dari para pendidik untuk memberikan bantuan dalam memberikan arahan terhadap anak didik, sehingga mereka ada perubahan sikap dan wawasan yang lebih bersifat positif bagi dirinya dan masyarakat secara umum. Pendidikan merupakan proses menumbuhkan dan mengembangkan apa yang ada pada peserta didik, baik secara fisik, psikis, sosial, maupun spiritual.⁴⁴

Pada dasarnya, pendidikan merupakan hal sangat penting dalam kehidupan manusia, baik dari individu maupun dalam masyarakat. Karena pendidikan merupakan syarat untuk menjadi manusia berkualitas. Selain itu dengan memiliki pendidikan, masyarakat secara individu bisa meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat. Seperti halnya dengan nasib anak jalanan secara umum mereka tidak bisa mendapatkan pendidikan secara layak. Kebanyakan mereka dari pendidikan rendah bahkan ada yang tidak pernah bersekolah, karena anak-anak ini harus bekerja di jalanan.

2. Ekonomi

Kehidupan keluarga yang serba kekurangan mendorong anak untuk turun ke jalan untuk bekerja dan mencari uang, baik untuk diri sendiri maupun untuk kebutuhan orang tua dan keluarga. Alasan ekonomi menjadi penyebab utama dari sekian banyak anak jalanan.

⁴⁴ Edi Iskandar, *Membaca Pemikiran Dua Tokoh Menuju Pendidikan Islam yang Kompetitif*, (Riau: Zanafa Publishing, 2017), h.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Terdorong keinginan untuk membantu ekonomi keluarga mereka terpaksa turun ke jalan.

Lebih lanjut, Karnaji menyatakan setidaknya ada tiga hal yang mendorong anak jalanan turun ke jalan;

- a. Motivasi muncul dari anak itu sendiri untuk membantu ekonomi keluarga
 - b. Keinginan untuk memenuhi kebutuhan diri sendiri, dan
 - c. Dipaksa oleh orang tua untuk bekerja.
3. Tradisi

Tradisi sering digunakan untuk menjelaskan keberadaan pekerja anak atau munculnya anak di jalanan. Bahwa anak-anak dari keluarga miskin tidak memiliki alternatif lain dan memang selayaknya bekerja. Sudah menjadi semacam aksioma kultural bagi banyak kalangan terutama di negara berkembang.

Selain itu, keluarga memiliki peranan yang sangat penting dalam proses tumbuh dan berkembangnya seorang anak. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, dan anaknya, atau ayah dengan anaknya, atau ibu dengan anaknya.⁴⁵ Hasil penelitian menunjukkan bahwa latar belakang keluarga berkaitan erat dengan perginya anak ke jalanan. Pada anak jalanan, salah satu permasalahan yang dihadapi mereka adalah telah bergesernya fungsi keluarga, salah satu contohnya fungsi ayah sebagai pencari nafkah

⁴⁵ Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Yogyakarta: UIN Malang Press, 2009),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang digantikan oleh anak-anak mereka. Orang tua sangat mempengaruhi keputusan anak dalam rangka mencari nafkah. Dukungan ini dapat berupa dukungan langsung maupun tidak langsung. Dukungan ini ditunjukkan dengan perilaku orang tua yang meminta uang setoran pada anak jalanan.⁴⁶

Keadaan sosial ekonomi keluarga yang serba kekurangan mendorong anak jalanan untuk mendapatkan penghasilan lebih. Keadaan sosial ekonomi keluarga dapat dilihat salah satunya melalui pekerjaan orang tua. Selain itu, berdasarkan penelitian Suhartini tingkat ekonomi keluarga anak jalanan dapat dilihat dari jumlah penghasilan orangtua anak jalanan dan banyaknya bentuk-bentuk tindakan kekerasan yang dialami anak jalanan dibagi ke dalam empat jenis, yaitu.⁴⁷

1) Kekerasan ekonomi

Kekerasan ekonomi cenderung dilakukan oleh anak jalanan laki-laki yang lebih tua darinya dan atau oleh aparat keamanan. Secara tidak langsung kekerasan ekonomi juga dilakukan oleh orang tua mereka. Kekerasan ekonomi yang dilakukan oleh orang tua mereka sendiri dapat berupa pemaksaan terhadap anak-anaknya yang masih di bawah usia untuk ikut serta memberi sumbangan secara ekonomi bagi keluarga. Kekerasan orang tua biasanya dilakukan dengan memarahi anak mereka jika beristirahat atau

⁴⁶ *Ibid*, h.74.

⁴⁷ Tini Suhartini, *Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan*. Skripsi Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat, (Bogor:IPB, 2008), h. 24.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

harus cepat-cepat berlari mendekati mobil apabila lampu merah menyala agar mendapat uang lebih banyak.

Kekerasan ekonomi juga dilakukan oleh aparat yang sering dilakukan cakupan pada anak jalanan. Cakupan dilakukan oleh petugas keamanan seperti Polisi Kotamadya (maksud Satpol PP) dan Hansip. Penangkapan yang dilakukan oleh petugas sebagai wujud pemerintah kota untuk menjaga ketertiban dan salah satu solusi yang dapat menyelesaikan permasalahan kota besar, sebaliknya justru dianggap sebagai tindak kekerasan ekonomi dan psikis bagi anak jalanan karena jika mereka sampai tertangkap, anak jalanan akan dimintai uang. Jika tidak diberi uang, anak jalanan tersebut diancam akan dimasukkan ke tempat penampungan-penampungan yang ada di daerah tersebut.

2) Kekerasan psikis

Bentuk kekerasan ini adalah berupa ancaman tidak diperbolehkan beroperasi/mengamen/mengemis di tempat tertentu, dimaki-maki dengan kata kasar sampai ancaman dengan menggunakan senjata tajam. Kekerasan psikis yang dilakukan baik oleh sesama anak jalanan atau aparat, cenderung memberikan dampak yang sangat traumatik.

3) Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan yang sangat mudah diketahui dengan melihat akibat yang ditimbulkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kekerasan fisik ini biasanya berupa tamparan, tendangan, gigitan, benturan dengan benda keras, sampai luka akibat terkena senjata tajam.⁴⁸

4) Kekerasan seksual

Kekerasan seksual merupakan bentuk pelecehan seksual yang dialami anak jalanan mulai yang sangat sederhana seperti mencolek pantat, pegang pegang payudara sampai diajak ke tempat-tempat yang biasa digunakan untuk melakukan hubungan seksual (losmen atau hotel-hotel kecil). Kekerasan seksual yang sering terjadi pada anak jalanan perempuan yang telah menginjak remaja (12 tahun ke atas).

Hal tersebut dapat dikategorikan ke dalam dua kategori yaitu kekerasan fisik dan kekerasan non-fisik. *Emotional abuse* dan *verbal abuse* dapat dikategorikan sebagai kekerasan non-fisik yang dapat berakibat pada psikis anak, sehingga dapat menghambat pertumbuhan anak. Sedangkan *physical abuse* dan *sexual abuse* dapat dikategorikan sebagai kekerasan fisik yang berakibat pada jasmani anak. Tingkat kekerasan yang dialami anak jalanan dalam penelitiannya tergolong dalam kategori rendah. Bentuk kekerasan yang dialami anak jalanan antara lain diejek teman, dimarahi teman karena melewati batas wilayah, dipaksa teman untuk menuruti kata-katanya, dipukul orang tua karena tidak memberi uang,

⁴⁸ Bagong Suyanto, *Opcit.*, h. 28-29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

digebukin teman karena melanggar wilayah kerja, *dihajar* preman karena tidak membayar uang keamanan dan pelecehan seksual.

5. Karakteristik Anak Jalanan

Berdasarkan intensitasnya di jalanan, anak jalanan dapat dikelompokkan menjadi tiga karakteristik utama yaitu:⁴⁹

1. *Chidren of the street*

Anak yang hidup/tinggal di jalanan dan tidak ada hubungan dengan keluarganya. Kelompok ini biasanya tinggal di terminal, stasiun kereta api, emperan toko dan kolong jembatan.

2. *Children on the street*

Anak yang bekerja di jalanan. Umumnya mereka adalah anak putus sekolah, masih ada hubungannya dengan keluarga namun tidak teratur yakni mereka pulang ke rumahnya secara periodik.

3. *Vulberable children to be street children*

Anak yang rentan menjadi anak jalanan. Umumnya mereka masih sekolah dan putus sekolah, dan masih ada hubungan teratur (tinggal) dengan orang tuanya. Jenis pekerjaan anak jalanan dikelompokkan menjadi empat kategori, yaitu:

- a. Usaha dagang yang terdiri atas pedagang asongan, penjual koran, majalah, serta menjual sapu atau lap kaca mobil.

⁴⁹ *Ibid* ,h.197

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Usaha di bidang jasa yang terdiri atas pembersih bus, pengelap kaca mobil, pengatur lalu lintas, kuli angkut pasar, *ojek* payung, tukang semir sepatu dan *kenek*.
- c. Pengamen. Dalam hal ini menyanyikan lagu dengan berbagai macam alat musik seperti gitar, *kecrekan*, suling bambu, gendang, radio karaoke dan lain-lain.
- d. Kerja serabutan yaitu anak jalanan yang tidak mempunyai pekerjaan tetap, dapat berubah-ubah sesuai dengan keinginan mereka.

Lebih rinci menurut sumber Dinas Sosial Pekanbaru bahwa karakteristik anak jalanan di tuangkan dalam matrik berupa tabel ciri-ciri fisik dan psikis anak jalanan berikut ini:

Tabel III.I
Ciri Fisik dan Psikis Anak Jalanan

Ciri Fisik	Ciri Psikis
1. Warna Kulit Kusam	1. Mobilitas tinggi
2. Rambut Kemerah-merahan	2. Acuh tak acuh
3. Kebanyakan berbadan kurus	3. Penuh Curiga
4. Pakaian tidak teurus	4. Sangat sensitive
	5. Berwatak Keras
	6. Kreatif
	7. Semangat hidup tinggi
	8. Berani menanggung resiko
	9. Mandiri
	10. Cenderung berkata kasar

Sumber: Dinas Sosial Kota Pekanbaru 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Siyasah Dusturiyah

1. Pengertian dan Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah

Dalam fiqh siyasah, konstitusi disebut juga dengan “*dusturi*”. Kata ini berasal dari bahasa Persia. Semula artinya adalah “seseorang yang memiliki otoritas, baik dalam bidang politik maupun agama.” Dalam perkembangan selanjutnya, kata ini digunakan untuk menunjukkan anggota kependetaan (pemuka agama) Zoroaster (Majusi). Setelah mengalami penyerapan ke dalam bahasa Arab, kata *dustur* berkembang pengertiannya menjadi asas, dasar, atau pembinaan. Menurut istilah, *dustur* berarti kumpulan kaidah yang mengatur dasar dan hubungan kerja sama antara sesama anggota masyarakat dalam sebuah negara, baik yang tidak tertulis (konvensi) maupun tertulis (konstitusi). Kata *dustur* juga sudah diserap ke dalam bahasa Indonesia yang salah satu artinya adalah undang-undang dasar suatu negara.⁵⁰

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, prinsip-prinsip yang diletakkan Islam dalam perumusan undang-undang dasar ini adalah jaminan atas hak asasi manusia, setiap anggota masyarakat dan persamaan kedudukan semua orang di mata hukum, tanpa membedakan stratifikasi sosial, kekayaan, pendidikan, dan agama.

A.Jazuli mengartikan bahwa permasalahan di dalam *fiqh siyasah dusturiyah* adalah hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya di pihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada dalam

⁵⁰ Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014) h. 177-178.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakatnya. Sudah tentu ruang lingkup pembahasannya sangat luas. Oleh karena itu, di dalam *fiqh siyasah* ini biasanya hanya dibatasi hanya membahas pengaturan dan perundangan-undangan yang dituntut oleh hal ihwal kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta memenuhi kebutuhannya.⁵¹

A.Jazuli mengupas ruang lingkup bidang *Siyasah Dusturiyah* menyangkut masalah-masalah hubungan timbal balik antara pemimpin dan rakyat maupun lembaga-lembaga yang berada di dalamnya. Karena terlalu luas, kemudian diarahkan pada bidang pengaturan dan perundangan-undangan dalam persoalan kenegaraan.

Lebih lanjut A.Jazuli mempetakan bidang *Siyasah Dusturiyah* menyangkut persoalan; 1) imam, hak dan kewajibannya; 2) rakyat, hak dan kewajibannya; 3) bai'at, 4) *waliyu al-'ahdi*; 5) perwakilan; 6) *ahlul halli wa al-'aqdi*; 7) *wuzarah* dan perbandingannya. Selain itu ada yang berpendapat bahwa bidang kajian *Siyasah Dusturiyah* meliputi: 1) konstitusi; 2) legislasi; 3) ummah; 4) *shura* atau demokrasi.⁵²

2. Konsep Kekuasaan dalam *Siyasah Dusturiyah*

Kekuasaan (*sulthah*) dalam konsep negara Islam, oleh Abdul Wahhab Khallaf dibagi menjadi tiga bagian, yaitu:⁵³

⁵¹ A.Djazuli, *Fiqh Siyasah*, (Bandung : Kencana, 2003), h.47.

⁵² Imam Amrusi Jalani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya :IAIN Press, 2011).h. 25-

⁵³ *Ibid*, h. 29.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Lembaga legislatif (*sultah tasyri'iyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan untuk membuat undang-undang.
- b. Lembaga eksekutif (*sultah tanfidhiyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang berfungsi menjalankan undang-undang
- c. Lembaga yudikatif (*sultah qadha'iyyah*), lembaga ini adalah lembaga negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman.

Adapun pentingnya kekuasaan kehakiman adalah untuk menyelesaikan perkara-perkara perbantahan dan permusuhan, pidana dan penganiayaan, mengambil hak dari orang durjana dan mengembalikannya kepada yang punya hak, melindungi orang yang kehilangan hak-haknya, mengawasi harta wakaf dan lain-lain.

Di dalam perkembangannya, lembaga peradilan dalam konsep hukum tata negara Islam dibedakan menurut jenis perkara yang ditangani. Lembaga peradilan tersebut meliputi *Wilayah al-Qada'*, *Wilayah al-Mazalim*, dan *Wilayah al-hisbah*. *Wilayah al-Qada'* adalah lembaga peradilan untuk memutuskan perkara-perkara awam sesama warganya, baik perkara perdata maupun pidana.

Wilayah al-Hisbah menurut al-Mawardi adalah wewenang untuk menjalankan amar ma'ruf ketika yang ma'ruf mulai ditinggalkan orang, dan mencegah yang munkar ketika mulai dikerjakan orang. Sehingga *Wilayah al-Hisbah* adalah suatu kekuasaan peradilan yang khusus menangani persoalan-persoalan moral dan wewenangnya lebih luas dari *Wilayah al-Qada'*. Wewenang *Wilayah al-Hisbah* menekankan ajakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk berbuat baik dan mencegah segala bentuk kemungkaran, dengan tujuan mendapatkan pahala dari ridha Allah SWT.

Adapun *wilayah al-mazalim* merupakan kekuasaan pengadilan yang bertugas mengadili para pejabat negara, meliputi para khalifah, gubernur, dan aparat pemerintah lainnya yang berbuat zalim kepada rakyat.⁵⁴ *Wilayah al-Mazalim* didirikan dengan tujuan untuk memelihara hak-hak rakyat dari perbuatan zalim para penguasa, pejabat dan keluarganya untuk mengembalikan hak-hak rakyat yang telah diambil oleh mereka, dan untuk menyelesaikan persengketaan antara penguasa dan warga negara. Yang dimaksudkan penguasa disini menurut al-Mawardi adalah seluruh jajaran pemerintahan mulai dari pejabat tertinggi sampai pejabat paling rendah.

Jika dihubungkan dengan masa sekarang, wewenang ini dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan keberadaan suatu negara. Untuk konteks negara Indonesia, wewenang yang dimiliki hakim Mahkamah Konstitusi dapat ditarik persamaan dengan apa yang pernah diterapkan *wilayah al-mazalim* pada masa lalu. Karena bagaimanapun, kezaliman pada konstitusi atau merampas akses politik rakyat merupakan kezaliman pejabat negara yang mengkhianati kedaulatan.⁵⁵

⁵⁴ A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), h. 113.

⁵⁵ *Ibid*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Pelayanan publik akan menghasilkan *output* atau hasil yang baik kepada masyarakat apabila pelayan publik atau aparatur negara memiliki kinerja yang baik. Kinerja tiap pegawai akan berpengaruh pada keberhasilan tujuan organisasi. Kinerja organisasi juga menentukan apakah tujuan, rancangan, dan manajemen organisasi tersebut sudah tercapai atau belum. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran pemerintah dalam hal ini sangat diperlukan untuk membantu permasalahan mereka. Dalam hal ini Dinas Sosial dibantu oleh Satpol PP yang berhak akan hal itu. Penanganan tersebut berupa bantuan Pendidikan, Bimbingan Sosial, Mental, Spiritual, Pendampingan, dan Reintegrasi Keluarga.
2. Efektivitas penanganan terhadap penurunan jumlah anak jalanan masih belum sepenuhnya terwujud. Buktinya jumlah anak jalanan pertahunnya meningkat. Ada beberapa faktor yang menjadi pengahambatnya seperti, tidak adanya pemberdayaan, fasilitas panti dalam naungan Dinas Sosial, keterbatasan anggaran dan sikap petugas Satpol PP ketika melakukan penertiban dianggap kurang baik. Hal-hal tersebut yang menyebabkan anak jalanan kembali lagi ke jalan walaupun sudah mendapatkan penanganan di Dinas Sosial Kota Pekanbaru

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Tinjauan Fiqh Siyasah yang berkaitan dengan permasalahan ini adalah *Siyasah Dusturiyah*, dimana keterkaitan hubungan antara Pemerintah dengan rakyatnya. Dengan tujuan pemerintah harus menjalankan aturan yang telah ada demi kesejahteraan rakyatnya bisa dikatakan *Maslahat Mursalah*. Sedangkan hasil dari penelitian, pemerintah dalam hal ini Dinas Sosial belum efektif dalam menangani permasalahan rakyatnya khususnya Anak Jalanan.

B. Saran

Berdasarkan penelitian dan pembahasan yang penulis peroleh agar penanganan terhadap anak jalanan berjalan dengan efektif yang dilakukan oleh Dinas Sosial Kota Pekanbaru, maka penulis memberikan saran yaitu:

1. Kepada pemerintah daerah khususnya kepada Dinas Sosial Kota Pekanbaru untuk mencari solusi atas permasalahan yang menjadi faktor penghambat terkait penanganan anak jalanan di Kota Pekanbaru. Selain itu, diharapkan kepada petugas penertiban agar lebih efektif untuk menjalankan tugasnya, dengan harapan permasalahan penyandang masalah kesejahteraan sosial di Kota Pekanbaru dapat teratasi dengan baik.
2. Kepada masyarakat Kota Pekanbaru untuk lebih peduli kepada penyandang masalah kesejahteraan sosial khususnya anak jalanan untuk tetap bersikap baik dalam menghadapi mereka karena bagaimanapun juga mereka masih dikatakan seorang anak. Dan juga melaporkan kepada pihak yang berwenang apabila timbul keresahan ditengah masyarakat atas kehadiran dan tingkah laku anak jalanan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepada Anak Jalanan Kota Pekanbaru untuk mentaati aturan yang berlaku dan diharapkan untuk lebih memaknai arti kehidupan yang sesungguhnya dengan tumbuh ditengah kehidupan yang layak seperti bersama keluarga dan menjalankan pendidikan dengan baik, dengan harapan dapat menggapai cita-cita dan membawa perubahan untuk bangsa Indonesia.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- A. Basiq Djalil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012)
- A. Djazuli, *Fiqh siyasah*, (Bandung;Kencana, 2003)
- Abu Samah, *Hukum Dan Administrasi Pemerintahan Daerah*, (Pekanbaru:Suska Press, 2018), h.40
- Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Persada, 2003). Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (Jakarta: sinar Grafika, 2002)
- Artis, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, (Pekanbaru;Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim riau,2014)
- Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Badan Pusat Statistik,*Proyeksi Penduduk Indonesia 2010-2035*, (Jakarta;Badan Pusat Statistik,2013)
- Bagong Suyanto,*Masalah Sosial Anak*, (Jakarta:Prenada Media Grup,2010)
- Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta;Raja Grafindo Persada,2010)
- Bambang Waluyo, *Penelitian hukum dalam Praktek*, (jakarta: sinar Grafika, 2002)
- Darmawati, *Determinasi Reistrasi Penduduk di Kota Pekanbaru*, (Riau; 2008) jurnal Vol.VIII
- Dedi Supriyadi, *Perbandingan Fiqh Siyasah*, (Bandung:Pustaka Setia,2007)
- Edi Iskandar, *Membaca Pemikiran Dua Tokoh Menuju Pendidikan Islam yang Kompetitif*, (Riau: Zanafra, 2017)
- Hadi Supeno, *Kriminalisasi Anak, Tawaran Gagasan Radikal Peradilan Anak Tanpa Pemidanaan*, (Jakarta:PT.Gramedia,2010)
- Harbani Pasalong, *Teori Administrasi Publik*, (Bandung:Alfabeta,2010)
- Hartono, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta:Nusa Media,2011)
- Herlina Astri, *Kehidupan Anak Jalanan di Indonesia:Faktor Penyebab, Tatanan Hidup, dan Kerentanan Berperilaku Menyimpang*, jurnal 22 Desember 2014

<https://pekanbarukota.bps.go.id>, diakses pada tanggal 5 Mei 2019



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

https://id.m.wikipedia.org/wiki/jalan_diakes pada tanggal 22 Oktober 2019

Imam Amrusi Jalani, *Hukum Tata Negara Islam*, (Surabaya : IAIN Press, 2011)

J. Suyuti Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1997)

Juliansyaah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, tesis, Disertasi, dan karya ilmiah*, (jakarta:kencana, 2011), Edisi ke-1, cet ke-1

M.Quraish Shihab, *Wawasan Qur'an*, (Bandung:Mizan, 1996), Cet. Ke-5

Muhammad Iqbal, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana, 2014)

Muhammad Khidri Alwi, *Kepemimpinan Dalam Perspektif Hadist*, Jurnal Rihlah Vol.5.No 2./2017

Mujar Ibnu Syarif, Khamami Zada, *Fiqh Siyasah doktrin dan pemikiran politik islam* (Jakarta:Erlangga, 2008)

Pandi Afandi, *Manajemen Sumber Daya Manusia*, (Yogyakarta:Zanafa Publishing, 2018)

Pasal 1 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 3 Tahun 2013

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan kesejahteraan sosial

Pasal 2 ayat (3) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 2 tahun 1988 tentang usaha kesejahteraan anak bagi anak yang mempunyai masalah

Pasal 20 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak

Pasal 4 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 7 Tahun 2001

R.A.Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, (Bandung: Sumur, 2005)

Rifa Hidayah, *Psikologi Pengasuhan Anak*, (Yogyakarta : UIN Malang Press, 2009)

Rif'atin Ni'marohah, *Upaya Rumah Belajar Pandawa Dalam Mengembangkan Emosional Spiritual Quotient (ESQ)*, (Studi Kasus Anak Jalanan di



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ngagel Wonokromo Surabaya), Skripsi, (Surabaya : IAIN Sunan Ampel , 2012)

Sedarmayanti, *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja*, (Bandung: Mandar Maju,2009)

Shanti Devi, *Kapasitas kader dalam penyuluhan keluarga berencana Di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan*, (Sumatera Selatan;2016)jurnal penyuluhan Vol.12 No.2,

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Alfabeta,2014)

Syaikh Sulaiman Ahmad Yahya Al-Faifi, *Ringkasan Fiqh Sunnah Sayyid Sabiq*, (Jakarta:Al-Kautsar, 2015) h.213

Tini suhartini, *Strategi Bertahan Hidup Anak Jalanan, Skripsi Program Studi Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat*, (Bogor: IPB, 2008)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Veithzal Rivai, Arviyan Arivin, *Islamic Leadership*, (Jakarta:PT Bumi Aksara, 2009) h.225

W.J.S. Poerwandarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, (Balai Pustaka:Amirko,1984)

UIN SUSKA RIAU

DOKUMENTASI

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Staff Penyuluh Konseling Dinas Sosial Kota Pekanbaru



Wawancara dengan Staff Pekerja Sosial Dinas Sosial Kota Pekanbaru

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara dengan Satpol PP



Bersama Komunitas Bahu Jalan



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau



Wawancara dengan Anak Jalanan di Kota Pekanbaru

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UIN SUSKA RIAU



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARIAH AND LAW

Jl. H.R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box. 1004 Telp. 0761-561645
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN PERBAIKAN SEMINAR PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

Proposal dengan judul EFEKTIFITAS KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH.

, ditulis oleh saudara :

Nama : FENI HAFIZA
NIM : 11624200698
Program Studi : HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)
Diseminarkan pada :
Hari / Tanggal : JUMAT, 12 APRIL 2019
Narasumber : Dr.ARISMAN,M.Sy

Telah diperbaiki sesuai dengan saran narasumber seminar proposal mahasiswa
Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Kepala Sub. Bagian Akademik

ASENDI S.Ag,M.Ag.
NIP.19610918198831002

Pekanbaru, 07 Mei 2019
Narasumber

Dr.ARISMAN,M.Sy.
NIK:130112052

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

© Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Penerbitan UIN Suska Riau

Un.04/F.I/PP.00.9/8214/2019

Pekanbaru, 15 Oktober 2019

Biasa

(Satu) Proposal

Mohon Izin Riset

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP
Provinsi Riau

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Disampaikan bahwa salah seorang mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Sultan Syarif Kasim Riau

Nama	: FENI HAFIZA
NIM	: 11624200698
Jurusan	: Hukum Tata Negara (Siyasah) S1
Semester	: VII (Tujuh)
Lokasi	: Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

bermaksud akan mengadakan riset guna menyelesaikan Penulisan Skripsi yang berjudul
: Efektifitas Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru dalam pembinaan terhadap anak
jalanan di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dalam Perspektif Fiqh Siyasah

Pelaksanaan kegiatan riset ini berlangsung selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai
tanggal surat ini dibuat. Untuk itu kami mohon kiranya kepada Saudara berkenan
memberikan izin guna terlaksana riset dimaksud

Demikian disampaikan, terima kasih.

a.n. Rektor
Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP. 19580712 198603 1005

Tembusan :
Rektor UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARI'AH & HUKUM

كلية الشريعة و القانون

FACULTY OF SYARI'AH AND LAW

Jl. H. R. Soebrantas No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

Pekanbaru, 09 Oktober 2019

Un.04/F.I.1/PP.00.9/8091/2019

Asas

Mohon Izin Melakukan PraRiset

Kepada
Yth.

Kepala Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

Tempat

Assalamu 'alaikum warhmatullahi wabarakatuh

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau dengan ini memberitahukan kepada saudara bahwa :

Nama : FENI HAFIZA
NIM : 11624200698
Semester/Tahun : VII (Tujuh)/ 2019
Program Studi : Hukum Tata Negara (Siyasah) S1

ditugaskan untuk melaksanakan riset guna mendapatkan data yang berhubungan dengan penelitiannya di Instansi yang saudara pimpin.

Sehubungan dengan itu kami mohon diberikan bantuan/izin kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian disampaikan atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Dekan

Dr. Drs. H. Hajar., M.Ag
NIP.19580712 198603 17005

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH PROVINSI RIAU

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Gedung Menara Lancang Kuning Lantai I & II Komp. Kantor Gubernur Riau
Jl. Jenderal Sudirman No. 460 Telp. (0761) 39119 Fax. (0761) 39117, PEKANBARU
Email : dpmpptsp@riau.go.id

Kode Pos : 28126



032010

REKOMENDASI

Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/26732
TENTANG

PELAKSANAAN KEGIATAN RISET/PRA RISET DAN PENGUMPULAN DATA UNTUK BAHAN SKRIPSI

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, setelah membaca permohonan Riset dari : **Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Suska Riau, Nomor : 503/DPMPPTSP/NON IZIN-RISET/26732** Tanggal 15 Oktober 2019, dengan ini memberikan rekomendasi kepada:

1. Nama : **FENI HAFIZA**
2. NIM / KTP : **11624200698**
3. Program Studi : **HUKUM TATA NEGARA (SIYASAH)**
4. Jenjang : **S1**
5. Alamat : **PEKANBARU**
6. Judul Penelitian : **EFEKTIVITAS KINERJA DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**
7. Lokasi Penelitian : **DINAS SOSIAL DAN PEMAKAMAN KOTA PEKANBARU**

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan.
2. Pelaksanaan Kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data ini berlangsung selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal rekomendasi ini diterbitkan.
3. Kepada pihak yang terkait diharapkan dapat memberikan kemudahan serta membantu kelancaran kegiatan Penelitian dan Pengumpulan Data dimaksud.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Dibuat di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 Oktober 2019



Ditandatangani Secara Elektronik Melalui :
Sistem Informasi Manajemen Pelayanan (SIMPEL)

DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumpulkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Tembusan :

Disampaikan Kepada Yth :

1. Kepala Badan Kesatuan



PEMERINTAH KOTA PEKANBARU BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

JL.ARIFIN AHMAD NO 39 TELP. – FAX : (0761) 39399 PEKANBARU

REKOMENDASI PENELITIAN

Nomor : 071/BKBP-REKOM/2019/3032



232018

a. Dasar : Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 Tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian.

b. Menimbang : Rekomendasi dari Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Riau, nomor 503/DPMPSTP/NON IZIN-RISET/26732 tanggal 15 Oktober 2019, perihal pelaksanaan kegiatan Penelitian Riset/Pra Riset dan pengumpulan data untuk bahan Skripsi.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru memberikan Rekomendasi kepada :

1. Nama : FENI HAFIZA
2. NIM : 116242000698
3. Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM UIN SUSKA RIAU
4. Jurusan : HUKUM TATA NEGARA
5. Jenjang : S1
6. Alamat : DUSUN BUNGA TANJUNG DESA PASAR BARU PANGEAN KEC. PANGEAN-KUANTAN SINGINGI
7. Judul Penelitian : EFEKTIVITAS KINERJA DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU DALAM MELAKUKAN PEMBINAAN TERHADAP ANAK JALANAN DI KECAMATAN TAMPAN KOTA PEKANBARU DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH
8. Lokasi Penelitian : DINAS SOSIAL KOTA PEKANBARU

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Tidak melakukan kegiatan yang menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan yang tidak ada hubungan dengan kegiatan Riset/Pra Riset/ Penelitian dan pengumpulan data ini.
2. Pelaksanaan kegiatan Riset ini berlangsung selama 2 (dua) bulan terhitung mulai tanggal Rekomendasi ini dibuat.
3. Berpakaian sopan, mematuhi etika kantor/lokasi penelitian, bersedia meninggalkan photo copy Kartu Tanda Pengenal.
4. Menyampaikan hasil Riset 1 (satu) rangkap kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Pekanbaru sesuai pasal 23 PERMENDAGRI No.64 Tahun 2011.

Demikian Rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 16 Oktober 2019

a.n. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Kota Pekanbaru
Kabid Politik dan Hubungan Antar Lembaga



Drs. H. ZULNAWIRAWAN, M.Si
NIP. 19690701 198909 1 001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tambahan



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

: FENI HAFIZA

: 11624200698

LEMBAGA PENDIDIKAN : UIN SUSKA RIAU

LEMBAGA PENELITIAN : Dinas Sosial dan Pemakaman Kota Pekanbaru

ALAMAT : Perum.Paradise Garden Regency,Blok H2

NO. HP : 081277607040

Dengan ini saya menyatakan bahwa akan mentaati dan tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan penerbitan rekomendasi Pra Riset dari Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Riau.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 15 Oktober 2019

YANG MEMBUAT PERNYATAAN



(FENI HAFIZA)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

RIWAYAT HIDUP PENULIS



FENI HAFIZA, Lahir di Pekanbaru pada tanggal 21 Juni 1998. Anak kedua dari Tiga bersaudara, dari pasangan ayahanda, Iskandar Ashari dan Nurhayati.

Pendidikan Formal yang ditempuh oleh penulis adalah SD Negeri 015 Pasar Baru Pangean, Kuansing, Riau, lulus pada tahun 2010. Kemudian

melanjutkan pendidikan di Mts Pangean, Kuansing, lulus tahun 2013, Setelah menyelesaikan pendidikan Mts, penulis melanjutkan pendidikan di MAN Taluk Kuantan dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan pendidikan ke Perguruan Tinggi Negeri dengan mengambil studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Sebagai tugas akhir perkuliahan penulis melaksanakan penelitian dengan judul *“Efektivitas Kinerja Dinas Sosial Kota Pekanbaru Terkait Penanganan Terhadap Anak Jalanan Di Kota Pekanbaru Dalam Perspektif Fiqh Siyash..”*

Penulis dinyatakan lulus pada sidang munaqasyah tanggal 25 Juni 2020 jurusan Hukum Tata Negara pada Fakultas Syariah dan Hukum dengan IPK terakhir 3.73 (Cumlaude) dan berhak menyandang gelar Sarjana Hukum (S.H)